# JAMINAN YANG

# KESEHATAN TAK SEHAT

Edisi 1 2020 — DAFTAR ISI

5 **Tajuk** Membangun sistem Jaminan Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat merupakan citacita besar yang sedang diupayakan untuk terwujud di Indonesia.

# 14 Berwisata ke Desa Kubu Gadang

Tak hanya pemandangannya, penduduk desa yang ramah dan suara anak kecil tertawa riang saat bermain pun mampu memikat hati siapapun yang datang berkunjung.

# 16 Kampanye Antikorupsi Menjangkau Telinga

Dalam era digital, podcast menjadi sebuah sarana dalam menyediakan konten menarik yang berbasiskan audio dan memiliki durasi yang cukup lama.

# 20 Gratifikasi Online

KPK meluncurkan aplikasi Gratifikasi OnLine (aplikasi GOL) sejak 12 Desember 2017. Tujuannya, untuk memudahkan para penyelenggara negara melaporkan gratifikasi.

# 22 Jaminan Kesehatan yang tak Sehat

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kajian terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Tim peneliti menemukan banyak kebocoran dalam sistem layanan kesehatan nasional ini yang mengakibatkan defisit mencapai Rp 12,2 triliun hingga akhir 2018. Kenaikan iuran bukan solusi.







# 38 Hukum Adat Pencegah Korupsi

Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan begitu banyak uang untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa di seluruh Indonesia. Tahun 2020, pemerintah memberikan 34 persen dari total belanja negara yaitu Rp858,8 Triliun. Angka ini meningkat 5,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Namun, besarnya uang rakyat yang dibagikan secara merata ke 74.517 desa dan 919 nagari itu seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Data Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa selama tahun 2015-2018 ada 252 kasus korupsi Dana Desa.

# 42 Penyelamat Terbesar Bumi adalah Kita

Menjaga lingkungan adalah kewajiban setiap manusia yang tinggal di bumi. Nadine Chandrawinata begitu khawatir melihat perilaku manusia yang kerap kali menilai bahwa menjaga lingkungan adalah sebuah pilihan, bukan kewajiban. Padahal menurutnya, penyelamat terbesar bumi adalah manusia itu sendiri.

# 47 Insinyur NU jadi Guru Bangsa

Sepanjang Karirnya, Gus Sholah adalah salah-satu tokoh yang getol memperjuangkan tegaknya sistem hukum dalam pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi beban berat KPK.

# 60 Cerita Para Pejuang Pertama

Suatu hari, telepon genggam Ateh berbunyi. Nama Sjahrudin Rasul tertera di layar. Lewat sambungan telepon tersebut, salah satu pimpinan jilid I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyampaikan permintaannya kepada Ateh.

### 62 Bicarakan Dengan Nada

Pesan itu akan lebih mudah diterima jika dibicarakan melalui musik. Berawal dari mendengarkan lagunya, pendengar baru akan menerima pesannya saat menikmati musik dan memperhatikan liriknya.

# integrito

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; Pengarah: Kepala Biro Humas KPK; Pemimpin Redaksi: Yuyuk Andriati Iskak; Redaktur Pelaksana: Lufti Avianto; Staf Redaksi: Afriyeni, Evi Tresnawati, Hanifatun Nisa Nurrohmatia, Siti Sharatassyah. Kontributor: Budi Prasetyo, Euodia Widya Lestari, Shantika Embun Diniakbari; Desain & Layout & Grafis: Iman Santoso; Periset Data: Sicilia Julianty Hutabarat; Fotografer: Sheto Risky Prabowo, Siti Sharatassyah; Sirkulasi: Sicilia Julianty Hutabarat , Sheto Risky Prabowo. Alamat Redaksi: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950; Telepon: (021) 2557 8300, Faks (021) 5289 2456; Email: integrito@KPK.go.id; Website: www.KPK.go.id; Facebook: Komisi Pemberantasan Korupsi; Twitter: @KPK\_RI; Instagram: @official.KPK; Youtube: KPK RI



# PERGIPAGI PULANG PETANG PENGHASILAN PAS-PASAN YANG PENTING BERKAH



# WARGANET

# **TAJUK**

# MENJAMIN KESEHATAN SETIAP WARGA NEGARA



### @HPuhobotot

buat KPK smga ttp smangat dlm mmberantas korupsi agar kemerdekaan dpt di maknai

### @Tano\_Maske

Sejatinya Kekuatan KPK itu ada pada orang2 KPK itu sendiri. Tetap Semangat dan teruslah berjuang mengabdi hanya kepada tuhan yg maha esa, bangsa dan negara. Bravo.. KPK.

# @ligaarief\_r

Terus berjuang untuk orang2 di KPK. Saya, rakyat kecil hanya bisa mendoakan kesehatan dan keselamatan anda2 semua....:)

# @GpKrisna

Terus bangun antikorupsi untuk indonesia

### sejahtera

### @Sugi71879614

Hidup KPK!!! Harus independen!! Rakyat mendukung KPK sepenuhnya!!! Semangat kerja nya yaa!!

# @@isatriawa

kalo ada upaya melemahkan KPK itu sama saja dengan membiarkan koruptor semakin kuat dan meraja lela.....upaya pembetantasan Korupsi itu harus kuat jika perlu terapkan hukuman yg seberat beratnya buat para pelaku koruptor

# @gue\_asep

Jangan kasih kesempatan buat orang mencoba mencari celah untuk membuat kebenaran dari kesalahan. KPK HARUS TETAP SEMANGAT! Membangun sistem Jaminan Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat merupakan cita-cita besar yang sedang diupayakan untuk terwujud di Indonesia. Hadirnya program jaminan kesehatan Nasional (JKN) menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih layak. Namun dalam perjalanannya, pengelolaan JKN bagi seluruh masyarakat Indonesia masih menjadi PR besar bagi pemerintah,

Tercatat pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan hingga tahun kelimanya masih mengalami defisit yang cukup besar. Sejumlah pos pengeluaran dinilai tidak efisien sehingga menyebabkan kebocoran. Pemerintah telah mengambil keputusan untuk menaikan iuran peserta BPJS Kesehatan sebagai upaya menutup defisit tersebut.

Namun sejumlah pihak merasa keputusan untuk menaikan iuran peserta BPJS Kesehatan bukanlah solusi terbaik. Hal ini bahkan hanya menambah beban masyarakat yang harus

membayar iuran BPJS dengan nominal yang lebih besar. Pemerintah diminta membuat sejumlah kebijakan diluar menaikan iuran BPJS untuk mengatasi kebocoran-kebocoran pengelolaan DJS kesehatan tersebut.

Mewujudkan sistem JKN memang bukan sekedar tugas pemerintah, ada peran masyarakat yang cukup vital dalam membangun fondasi pengelolaan DJS, yaitu dengan aktif melakukan iuran rutin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, ditambah lagi jika manfaat DJS Kesehatan tersebu telah dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain pemerintah yang harus cermat menentukan kebijakan dalam pengelolaan DJS Kesehatan. Masyarakat juga harus ambil bagian guna menyukseskan program jaminan kesehatan selain dengan membayar iuran. Misalnya dengan mengawasi pengelolaan DJS Kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan. Sehingga tidak ada yang lagi kecurangan-kecurangan yang ditemukan dalam upaya mewujudkan jaminan kesehatan untuk semua.

RAPID TEST DI KPK - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninjau jalannya rapid tes untuk seluruh pegawai sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Gedung Merah Putih KPK pada Maret 2020.

**TES PCR DI KPK** - Dua tersangka korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan tes Swab sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Gedung Merah Putih KPK pada Maret 2020.

# BERWISATA KE DESA KUBU GADANG

menawarkan berbagai potensi desa mereka. Namanya Desa Wisata Kubu Gadang, 60 kilometer arah utara dari Kota Padang, Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat.

Desa Wisata Kubu Gadang menawarkan pariwisata Pasar Digital yang diresmikan 28 Oktober 2018. Menariknya untuk membeli sesuatu di pasar digital, pengunjung harus menukarkan uangnya dengan kepingan berbahan kayu. Selain itu, Desa Wisata Kubu Gadang menyiapkan paket wisata menarik bagi wisatawan yang menginap. Paket wisata dibagi dalam tiga kategori: kuliner, atraksi, dan edukasi. Pada paket kuliner, pengunjung bisa mencoba makan baradaik, yakni makan dengan prosesi pesta khas di Minang. Pilihan lain adalah makan bajamba alias makan bersama.

Sementara pada paket atraksi pengunjung bisa melihat pertunjukan silek lanyah, randai dan tari tradisional minang kabau. Silek lanyah adalah atraksi pertarungan silat yang dilakukan di lahan sawah berlumpur. Terakhir paket edukasi, pengunjung bisa belajar masak tradisional marandang (membuat rendang, masakan khas minang), membajak sawah, dan lain-lain.

Kubu Gadang kini viral di media sosial. Umumnya pengunjung datang untuk menikmati kebudayaan dan mencari spot foto untuk diunggah ke media sosial. Pemandangan tiga gunung yang

mengelilingi Padang Panjang memang sangat memikat dilihat dari Desa Kubu Gadang. Ketiga gunung tersebut adalah Singgalang, Tandikek, dan Marapi. Bukit Tui yang menjulang di jantung kota pun ikut melengkapi lanskap Desa Kubu Gadang.

Desa Kubu Gadang juga menyediakan lapak kuliner warga untuk berjualan, mulai dari martabak mini, sate hingga lamang tapai. Awalnya ada 30 pedang di Di Pasar Digital Desa Kubu Gadang. Kini hanya 10 pedagang yang bertahan, Samsidar diantaranya. Meskiomsetterus menurun, Dia terus bertahan agar pasar kuliner Kubu Gadang yang telah dirintis bersama tetap diakui keberadaannya. "Kalau baranti pulo dari sini, otomatis kan tambah mati Pasar Kubu Gadang." Kata Samsidar.

Menurut salah satu pengunjung, kurangnya inovasi menjadi salah satu penyebab sepinya Pasar Kubu Gadang, terutama inovasi pada kuliner khas Kota Padang Panjang.

Inisiator dan pengelola Desa Wisata Kubu Gadang, Yuliza Zein mengakui mulai menurunnya jumlah pengunjung dan pedagang Desa Kubu Gadang. Menghadapi permasalahan ini, Yuliza beserta panitia lainnya berusaha untuk menumbuhkan kembali jiwa kewirausahan masyarakat desa agar dapat terus bertahan.

Mengembangkan dan mempertahankan desa wisata memang bukan kerjaan gampang. Butuh keterlibatan dan komitmen banyak pihak agar desa wisata bisa terus berbenah agar mampu bertahan dan berkembang. Kita juga bisa ikut berperan mengembangkan Desa Kubu Gadang dengan mengunjunginya.

Jangan sampai melewatkan keelokan Desa Kubu Gadang.

Gunung dan sawah selalu indentik dengan pedesaan. Hawa yang sejuk, langit biru, hamparan sawah luas nan hijau, gemericik air kali mengaliri sawah. Tak hanya pemandangannya, penduduk desa yang ramah dan suara anak kecil tertawa riang saat bermain pun mampu memikat hati siapapun yang datang berkunjung. Itulah desa, selalu dirindu siapa pun.

Sadar akan potensi alam desa dan kekayaan budaya, banyak desa kini berbenah jadi objek wisata. Saat pelancong dapat pengalaman mengasikkan di desa, masyarakat desa bisa terus melestarikan budaya dan tradisinya. Tidak hanya itu, desa wisata juga meningkatkan kehidupan masyarakat

desa, dengan munculnya lapangan kerja baru dan hadirnya berbagai fasilitas desa yang diperbaiki saat desa menjadi desa wisata. Memperkenalkan produk lokal seperti kerajinan dan makanan juga jadi nilai posisif hadirnya desa wisata.

Tahun 2017, Kementerian Pariwisata menargetkan akan hadir 2000 desa wisata ditahun 2020. Dalam rentang waktu itu, desa di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat hadir



PODKES KANAL KPK

# KAMPANYE ANTIKORUPSI MENJANGKAU TELINGA

Di era saat ini, Podcast menjadi salah satu media baru di dunia siaran Indonesia khususnya pada konten audio. Dalam era digital, podcast menjadi sebuah sarana dalam menyediakan konten menarik yang berbasiskan audio dan memiliki durasi yang cukup lama.

Istilah Podcast berasal dari gabungan kata "Pod" dan "Broadcasting". Kata pod merujuk pada pemutar media digital ciptaan Apple yaitu iPod sedangkan cast adalah kependekan dari broadcast atau siaran. Podcast sudah ada sejak tahun 2005, kemudian tahun 2007 podcast mulai banyak digunakan dan berkembang pesat hingga sekarang.

Podcast juga dikenal sebagai file digital berupa audio *non-streaming*. Untuk mendengarnya, kita perlu mengunduh aplikasi tertentu lebih dulu. Podcast sudah sangat populer di mancanegara, seperti Amerika, Inggris dan Australia untuk mendengarkan berita, ilmu pengetahuan, dan sharing informasi lainnya yang bisa diulang terus menerus.

Popularitas podcast di tanah air, dimulai ketika Spotify membuka *platformnya* untuk podcast sejak Oktober 2018. Pesohor negeri pun berpacu menggunakan podcast di Spotify. Tak mau ketinggalan, KanalKPK Radio di pertengahan tahun 2019 'melirik' podcast sebagai strategi baru distribusi kontenkonten audio media KPK. Spotify dipilih sebagai platform etalase utama produk audio KanalKPK karena di tahun 2019 pengguna Spotify telah mencapai angka 180 juta akun di Indonesia.

Ketua Tim Audio dan Promosi KanalKPK, Shantika Embun Dini mengatakan, konsep publikasi ini dipilih seiring perkembangan tren dan preferensi pengguna/konsumen media berformat audio di Indonesia. Selain itu, metode penyiaran radio secara streaming yang sebelumnya digunakan KanalKPK memiliki 'kekurangan' karena tak mudah mengukur pendengar atau viewers, sehingga secara statistik cukup sulit menghitung engagement dan impression media ini.

Sejak Juli 2019, KanalKPK Radio telah mengunggah sebagian besar konten publikasi bertema antikorupsi yang semula hanya dapat diakses di website KanalKPK. Kontenkonten yang telah dimigrasi tersebut diantaranya adalah Klinik Gratifikasi, Klinik LHKPN, Kanal Gesik (komedi), Sandiwara Radio, Tahukah Anda dan Dongeng Anak. Sampai saat ini lebih dari 100 konten podcast KanalKPK bisa didengar.

"Pemilihan konten yang ditempatkan di podcast KanalKPK disesuaikan dengan audiens yang ingin disasar, yaitu kalangan anak muda atau millenials hingga dewasa," jelas Shantika. Sejauh ini viewer Podcast KanalKPK cukup medium, hampir 2000 viewer.

KPK menjadi lembaga negara pertama di Indonesia yang memanfaatkan jalur podcast sebagai jalur publikasinya. Agar semakin banyak yang mengakses Podcast KanalKPK di Spotify, promo dilakukan pada media sosial KPK dan Whatsapp Grup jaringan KPK. Selain itu nanti akan dilakukan survey untuk mengetahui konten yang ingin didengar masyarakat di Podcast KAnalKPK.

Konten-kontennya juga akan diperbaharui konsepnya ke bincang dua orang atau lebih. Hal-hal yang dibicarakan juga akan lebih ringan, lebih humanis dan "ramah" ditelinga pendengar. "KanalKPK juga akan mengundang tamu atau narasumber eksternal lembaha untuk mendengar pengalaman dan pandangan mereka tentang antikorupsi di Indonesia." tambah Shantika.

Medium informasi Podcast layak dijajal untuk mengkampanyekan nilai antikorupsi melalui pendekatan percakapan. Medium informasi yang sangat gampang dijangkau, akan memperluas dukungan publik untuk gerakan antikorupsi, menambah informasi masyarakat terkait upaya pemberantasan korupsi.

Podcast KanalKPK di Spotify menjadi salah satu media sosialisasi KPK dalam menyampaikan pesan antikorupsi. Harapannya pendengar mengenal dan paham tentang nilai-nilai antikorupsi. "Jadi setelah mengenal dan memahami, kami mengharapkan dukungan pendengar sebagai masyarakat dalam menyebarluaskan pesan-pesan antikorupsi." Tutup Shantika.

PODCAST KANALKPK BISA DIAKSES LEWAT APPLE PODCASTS DAN SPOTIFY

# KEJUJURAN DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARA NEGARA DALAM LHKPN

ujurkah para penyelenggara negara menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)? Pertanyaan ini mungkin pernah melintas di benak kita. Lantas jika mereka tidak jujur, apakah KPK memeriksanya sehingga ketidakjujuran itu bisa terbongkar? Apakah ada sanksinya? Banyak pertanyaan lainnya yang bemunculan, saat membahas kejujuran penyelenggara negara menyampaikan LHKPN mereka.

Menjawabnya, kanal KPK meluncurkan Bincang Kanal: Untuk Apa Pejabat Publik Jujur dan Transparan, di Chanel Youtube Kanal KPK.

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Isnaini yang menjadi narasumber mengatakan bahwa LHKPN adalah salah satu produk KPK yang berfungsi sebagai pencegahan korupsi di Indonesia. LHKPN menjadi sarana bagi masyarakat untuk memonitor, seberapa besar harta seorang penyelenggara negara dari sebelum menjabat, hingga sampai selesai menjabat. "Dari sini diharap akan timbul rasa malu jika hartanya (seorang pejabat/penyelenggara negara) bertambah secara tidak wajar yang dicurigai dari hasil korupsi, "ujar Isnaini.

Lantas siapa saja yang disebut penyelenggara negara dalam LHKPN? Penyelenggara negara yang dimaksud dalam LHKPN merujuk pada penyelenggara negara menurut UU no. 28 th 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Pada undang-undang tersebut didefenisikan

ada 7 jenis penyelenggara negara : pejabat negara di lembaga tertinggi negara, pejabat negara di lembaga tinggi negara, menteri , gubernur, hakim dan penyelenggara negara lainnya yang ditentukan oleh perundang-undangannya, serta penyelenggara negara yang memiliki fungsi strategis menurut perundang-undangannya.

7 jenis penyelenggara negara itu kemudian di*cluster* dalam 4 bagian yaitu, eksekutif, legislatif, Yudikatif dan BUMN/BUMD dalam LHKPN. Data KPK terbaru menyebut, ada sekitar 340 ribu lebih wajib lapor LHKPN, 90% diantaranya telah menyampaikan LHKPN 2018 yang disubmit tahun 2019. Terjadi peningkatan 30% jika dibandingkan dengan laporan LHKPN tahun 2017 (disubmit tahun 2018) yang hanya 60%.

Ada dua hal yang menyebabkan laporan LHKPN belum mencapai 100%. Pertama perubahan metode penyampaian LHKPN metode manual, per 2017 beralih ke metode elektronik via aplikasi. Selanjutnya karena belum ada ketentuan sanksi administrasi yang berlaku secara nasional

bagi yang belum lapor LHKPN.

Isnaini menambahkan, untuk peyelenggara negara yang tidak patuh menyampaikan LHKPN, KPK akan bersurat kepada pimpinan instansi penyelenggara negara yang bersangkutan. Surat tersebut memuat nama penyelenggara negara yang belum menyampaikan LHKPN dan permintaan pemberian sanksi sebagaimana yang diatur internal instansi. "Kadang ada balasan dari instansi, bahwa sudah dilakukan peneguran dan meminta penyelenggara negara tersebut menyampaikan LHKPN-nya ke KPK," ujarnya.

Saat ditanya apakah ada kaitannya antara LHKPN dan korupsi, Isnaini menjelaskan bahwa dalam pencegahan korupsi, LHKPN memiliki 3 fungsi. Pertama prefentif atau pencegahan, dimana penekanannya kembali kepada diri pribadi penyelenggara negara untuk takut korupsi karena akan terjadi lonjakan harta yang akan terlihat di LHKPN. Kedua fungsi detektif yaitu sebagai alat untuk mendeteksi apakah dalam LHKPN tersebut ada hal-hal yang perlu didalami lebih lanjut atau tidak. Ketiga

fungsi *support* bagi penindakan, "jika penyelenggara negara terkena kasus di KPK, maka LHKPN menjadi salah satu sumber bagi unit Penindakan KPK, untuk melakukan misalnya aset racing terkait kebutuhan penyitaan dalam konteks pemulihan kerugian keuangan negara," paparnya.

Isnaini juga mengingatkan peran masyarakat memantau kejujuran penyelenggaran negara menyampaikan LHKPN sangat penting. Masyarakat dapat mengetahui harta penyelenggara, dengan mengetik nama penyelenggara negara yang dimaksud pada kolom search di laman e-Announcement LHKPN pada e-Ihkpn.KPK.go.id. Setelah menekan tombol search, maka akan keluar ikhtisar LHKPN penyelenggara negara yang bersangkutan. Dari sana masyarakat bisa melihat apakah benar seluruh harta sudah disampaikan atau belum. "Sampaikan di kolom komentar yang tersedia, tinggal ditulis saja harta apa yang belum disampaikan," tegasnya.

Bagaimana dengan keterangan LHKPN wajar dan tidak wajar? Apakah ada penyelenggara negara yang patuh lapor LHKPN, kemudian jadi tersangka korupsi? Jika melihat harta penyelenggara negara yang ratusan milyar apakah sudah boleh langsung curiga terjadi praktek korupsi? Simak penjelasan lengkapnya di Bincang Kanal: Untuk Apa Pejabat Publik Jujur dan Transparan, pada Chanel Youtube Kanal KPK.

# **GRATIFIKASI** ONLINE

KPK meluncurkan aplikasi Gratifikasi OnLine (aplikasi GOL) sejak 12 Desember 2017. Tujuannya, untuk memudahkan para penyelenggara negara melaporkan gratifikasi. Aplikasi ini bisa diunduh melalui gawai, sehingga pelaporan gratifikasi bisa dilakukan dalam genggaman tangan.

Setiap tahun, jumlah pengguna aplikasi GOL semakin meningkat. Tahun 2019, peningkatan jumlah pengunjung aplikasi GOL meningkat 60,59% dari tahun sebelumnya.

# **Jumlah Pengunjung**

131.786

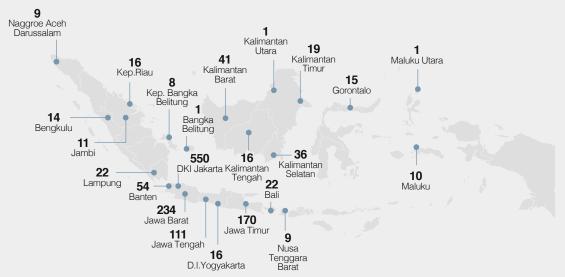
Pengunjung 2019







# Lokasi Pelaporan GOL





Serikat



Tiongkok





Iran



Jerman

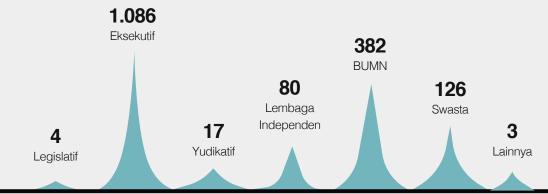


5

Kamboja

Malaysia

# Laporan Gratifikasi berdasarkan Instansi



# Jenis Gratifikasi yang dilaporkan



Laporan Barang

Laporan Makanan

Laporan Uang



# JAMINAN KESEHATAN YANG TAK SEHAT

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kajian terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Tim peneliti menemukan banyak kebocoran dalam sistem layanan kesehatan nasional ini yang mengakibatkan defisit mencapai Rp 12,2 triliun hingga akhir 2018. Kenaikan iuran bukan solusi.

# UTAMA

udah jatuh tertimpa tangga. Begitulah yang dialami Setiyo Wahyu Riyantono, 19 tahun, warga Bekasi, Jawa Barat, pada setahun yang lalu. Sudah jatuh, memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, toh tetap membayar biaya berobat juga. "Kartu BPJS saya katanya non aktif," kata Setiyo menceritakan pengalamannya menggunakan Kartu BPJS.

Setiyo mengalami kecelakaan motor pada Mei tahun lalu. Lukanya tak terlalu parah, namun ia tetap harus mendapatkan perawatan salah satu rumah sakit terdekat di Bekasi. Dia awalnya menyodorkan Kartu BPJS yang sudah ia miliki selama tiga tahun terakhir. Meski ia rutin membayar iuran untuk kelas II tiap bulan, kartu BPJS itu tak bisa dia gunakan kala sedang dibutuhkan.

Pemerintah meluncurkan BPJS Kesehatan sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional pada 2014. Program ini diharapkan dapat memenuhi biaya layanan kesehatan yang dibutuhkan tiap individu masyarakat melalui pengumpulan Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Selama ini, biaya kesehatan sangat mahal sehingga muncul adagium

Kajian ini juga melihat bagaimana mekanisme pengendalian internal di BPJS Kesehatan dapat mencegah terjadinya kecurangan.

orang miskin tidak boleh sakit. Dengan adanya layanan Jaminan Kesehatan Nasional ini, seluruh masyarakat dari berbagai kalangan diharapkan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

Selama lima tahun pelaksanaan program ini, sejumlah permasalahan menyeruak. Alhasil pelayanan kesehatan belum bisa optimal dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Selain kasus kartu BPJS non aktif meski premi tetap bayar seperti yang dialami Setiyo, persoalan yang paling utama adalah defisit Dana Jaminan Sosial untuk membayar

tagihan klaim fasilitas kesehatan tiap tahunnya. Hingga 2019, defisit mencapai Rp 12,2 triliun. Padahal, pemerintah telah menyuntikkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 26,1 triliun dalam kurun 2014-2018.

Agar manfaat Dana Jaminan Sosial ini optimal dan sehat bisa dinikmati siapa saja, tim Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kajian selama 10 bulan pada tahun lalu. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan lembaga antikorupsi berkomitmen penuh mengawal tata kelola Dana Jaminan Sosial karena kesehatan adalah hal mendasar yang menjadi hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana mandat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kajian KPK berangkat dari mengetahui mekanisme pengumpulan iuran serta pembayaran klaim fasilitas kesehatan. Tim penelitian kemudian mengidentifikasi titik rawan korupsi dari pengelolaan Dana Jaminan Sosial Kesehatan. "Kajian ini juga melihat bagaimana mekanisme pengendalian internal di BPJS Kesehatan dapat mencegah terjadinya kecurangan," kata Ghufron.

Menurut dia, tim Penelitian dan Pengembangan KPK menemukan persoalan defisit BPJS Kesehatan akibat dari ketidaksesuaian pendapatan yang bersumber dari iuran peserta dengan jaminan kesehatan yang harus dibayarkan. "Pengelolaan sistem jaminan kita masih tidak efisien," kata Ghufron.

Beberapa sektor yang terjadi inefisiensi, yakni moral hazard dari peserta mandiri. Banyak peserta BPJS yang memiliki itikad tidak baik. Peserta mandiri ini menggunakan layanan Jaminan Kesehatan Nasional lantas menunggak iuran. Dia mencontohkan seseorang akan operasi, kemudian mendaftar BPJS. Setelah tiga bulan operasi yang biayanya ditalangi BPJS itu, orang tersebut tak melanjutkan pembayaran tiga bulan

kemudian. Hal ini berbeda dengan peserta yang iuran bulanannya ditanggung perusahaan swasta atau pemerintah.

Pemborosan berikutnya disebabkan kelebihan pembayaran karena kelas rumah sakit yang tidak sesuai. Satu daerah, misalnya, memiliki fasilitas dan prasarana untuk kelas II, tapi Dinas

Kesehatan setempat merekomendasikan klaim untuk kelas di atasnya. "Sehingga mengakibatkan pembayaran yang lebih tinggi," ujarnya. Ketidakefisienan juga akibat *fraud/* tindakan curang dalam upcoding.

la menilai sesungguhnya solusi agar tidak terjadi defisit bukanlah menaikkan iuran BPJS hampir 100 persen untuk pekerja informal dan bukan penerima upah menjadi Rp 160 ribu per bulan untuk kelas I, Rp 110 ribu untuk kelas

# UTAMA

II, dan Rp 42 ribu untuk kelas III seperti yang dicanangkan pemerintah pada awal tahun ini. Dia pun bersyukur Mahkamah Agung membatalkan putusan kenaikan iuran ini pada April lalu. Soalnya, selama ini tata kelola BPJS yang bermasalah, bukan iuran yang terlalu rendah.

Keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah indikator utama suksesnya perlindungan

sosial kesehatan. Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun, ia memastikan kepesertaan seluruh dalam BPJS akan menurun. Dari hasil kajian KPK, menurut Ghufron, solusi vang tepat agar tidak terjadi defisit dan Dana Jaminan Sosial bermanfaat bagi

seluruh rakvat Indonesia adalah dengan melakukan verifikasi secara benar dan menyeluruh mulai dari peserta, rumah sakit, dan kategori penyakit.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan Kementerian Kesehatan harus segera melaksanakan mekanisme urun biaya kepada peserta maupun asuransi swasta. Kementerian Kesehatan dapat mempertimbangkan opsi pembatasan manfaat untuk pelayanan yang menghabiskan biaya tinggi, serta melakukan percepatan penyelesaian Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran esensial.

Untuk menutup celah kecurangan di sistem pembayaran, ia berharap BPJS Kesehatan dapat melakukan perbaikan pada sistem verifikasi klaim BPJS Kesehatan, pembersihan data, dan audit klaim untuk data anomali. "Juga sentralisasi pembayaran klaim otomatis dari kantor pusat," ujar Pahala.

KPK menyerahkan rekomendasi ini secara resmi kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, Maret lalu. "Kami memandang rekomendasi tersebut adalah solusi untuk memperbaiki inefisiensi dan menutup potensi penyimpangan (fraud) yang kami temukan dalam kajian," kata Pahala.

Menyikapi rekomendasi KPK ini, Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Igbal Anas Ma'ruf mengatakan lembaganya secara intens menggelar koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian atau lembaga. Dengan Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan koordinasi menyangkut teknis pembiayaan, Bersama Kementerian Sosial, BPJS berkoordinasi terkait pendataan dan penyediaan data masyarakat yang miskin dan tidak mampu untuk dimasukkan ke dalam data kepesertaan Peneirma Bantuan luran (PBI). "Dengan Kementerian Kesehatan, kami koordinasi terkait benefit pelayanan kesehatan," ujar labal.

Igbal mengklaim selama ini BPJS Kesehatan telah berupaya mengurangi

kerugian. Menurut dia, lembaganya setidaknya telah menyiapkan empat solusi komprehensif untuk menvelesaikan masalah finansial BPJS Kesehatan. Pertama, dengan menyesuaikan besaran iuran. Kedua, memaksimalkan penagihan iuran (kolektibilitas). Ketiga, mencegah moral hazard peserta dan kecurangan (fraud) oleh rumah sakit. Terakhir, meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Di sisi lain, kata dia, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 menyebutkan dalam kondisi Dana Jaminan Sosial defisit, pemerintah memiliki tiga pilihan untuk melakukan tindakan khusus, yaitu menyesuaikan iuran, menyesuaikan manfaat, atau memberikan suntikan dana.

Tiga pilihan tersebut harus dilakukan secara bersamaan dan terintegrasi. Bagi Igbal, bukan hanya pemerintah yang berkewajiban menyuntikkan dana. "Harus muncul kesadaran bersama bahwa menaikkan iuran dan menyesuaikan manfaat layanan harus diterima masyarakat apabila program yang terbukti sangat baik ini tetap akan berlanjut berkesinambungan," ucapnya.

Konsistensi BPJS Kesehatan menaikkan luran ini terus berjalan meski Mahkamah Agung membatalkan putusan ini pada April lalu. Sebulan setelah putusan itu, pemerintah menaikkan kembali tarifnya di segmen pekerja informal dan bukan penerima Upah menjadi Rp 150 ribu per bulan untuk kelas I, Rp 100 ribu untuk kelas II, dan menambah subsidi kelas III sehingga beban peserta hanya Rp 25 ribu.

Ekonom senior Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Didik J. Rachbini berpendapat kenaikan iuran hanya satu solusi kecil mengatasi permasalahan BPJS Kesehatan. Justru yang lebih penting adalah memastikan alokasi subsidi iuran tepat sasaran. Didik menyarankan pemerintah menetapkan kriteria warga miskin yang layak mendapat subsidi. Para petugas BPJS Kesehatan harus jeli mengenali kelompok masyarakat miskin ini dengan ciri pemilikan aset yang rendah. Contohnya, tidak punya motor, rumahnya berlantai tanah, jamban sederhana, dan kriteria miskin lainnya. "Golongan ini harus mendapat perhatian," kata Didik dalam keterangan tertulisnya.

Langkah selaniutnya adalah mengeluarkan 'penyusup' dari kelompok masyarakat penerima subsidi. Penyusup yang dimaksud adalah mereka yang memiliki taraf ekonomi relatif baik namun berlagak miskin demi bisa menikmati subsidi iuran BPJS Kesehatan. "Pejabat BPJS masih awam, tidak mengenali moral hazard yang sangat besar dan berat di dalam sistem BPJS. Selama ini tidak diselesaikan, maka BPJS gampang bangkrut," ucapnya. Bila BPJS Kesehatan gagal menganalisa dan menyeleksi peserta yang benarbenar miskin dan peserta yang pura-pura miskin, Didik mengatakan keuangan lembaga ini akan terus berdarahdarah.\*\*

26

# ATASI DEFISIT, PATUHI REKOMENDASI

Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan banyak kebocoran dalam tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Mulai dari kecurangan rumah sakit menaikkan kelas hingga diagnosis dokter yang memilih tindakan yang tidak perlu atau paling mahal akibat tidak ada pedoman penanganan penyakit pasien. Tim Kedeputian Pencegahan memberikan sejumlah 'resep" untuk membereskan kekacauan ini sehingga bisa menekan atau bahkan menghilangkan defisit.

beserta sebundel Penelitian Pengembangan Kedeputian Pencegahan Pemberantasan Korupsi dikirim kepada Presiden Joko Widodo pada 30 Maret lalu. Dokumen itu berupa hasil kajian mengenai Tata Kelola Dana Jaminan Kesehatan. Di dalam surat yang diteken Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan beserta pimpinan komisi antikorupsi juga mencantumkan enam rekomendasi kepada pemerintah sebagai wujud dukungan penuh agar tercapai pemenuhan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi seluruh warga

Hasil penelaahan KPK, defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang tiap tahun terus melonjak berpotensi terjadinya korupsi di tingkat operasional. "KPK melakukan kajian khusus opsi-opsi yang bisa diambil untuk menutup defisit selain iuran," kata Pahala, Jumat, 13 Maret 2020.

Kenaikan iuran sempat masuk dalam bahasan diskusi untuk menutup defisit BPJS. Namun, Pahala yakin banyak jalan keluar lain yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan defisit. Ini bukanlah pertama kali KPK melakukan kajian di sektor kesehatan. Pada 2015 lalu, KPK membuat rekomendasi mengenai perlunya Kementerian Kesehatan menyelesaikan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran. Pedoman ini bisa menjadi acuan bagi para tenaga medis untuk mengatasi suatu penyakit dengan standar dan biaya yang telah ditetapkan.

PNPK ini pula yang menjadi rekomendasi utama KPK kepada Presiden untuk menutup defisit. Presiden agar memerintahkan Menteri Kesehatan untuk segera merampungkan PNPK esensial. Dari 74 PNPK, Kementerian Kesehatan baru menyelesaikan 40 selama enam tahun terakhir. PNPK menjadi standar BPJS dalam membayar klaim rumah sakit dan rujukan dokter dalam menangani pasien. "Ketiadaan PNPK akan mengakibatkan pengobatan yang tidak diperlukan," ujar Pahala.

Tahun lalu, dengan nilai klaim Rp 109 triliun, BPJS

# UTAMA

membayar tindakan tak perlu itu sebesar 5-10 persen. Ketiadaan PNPK juga membuat rumah sakit dan dokter memanipulasi tagihan untuk mendapatkan bayaran besar dengan cara mengubah diagnosis atau menaikkan layanan yang lebih tinggi dari kelas pasien seharusnya.

Pengobatan yang tidak perlu atau *unnecessary treatment* sekitar 5-10 persen dari total dana klaim. Kasus klaim katarak 2018 dengan total klaim Rp 2 triliun, estimasi pengobatan yang tidak diperlukan sekitar Rp 200 miliar. Pada 2018, juga terdapat pengobatan yang tidak diperlukan untuk bedah caesar dan fisioterapi.

Kebocoran paling banyak dari kecurangan ini ada di kelas I dan II pekerja informal dan bukan penerima upah, mereka yang membayar penuh iurannya. Segmen ini lebih banyak diisi kelas menengah. Namun mereka selalu menunggak pembayaran. Dari tunggakan Rp 7,3 triliun pada tahun lalu, iuran yang masuk dari segmen ini hanya Rp 12,4 triliun, sementara klaim kepada BPJS mencapai Rp 39,8

# Kementerian Kesehatan menemukan 898 rumah sakit yang tidak sesuai dengan kelasnya.

triliun. Pembengkakan itu akibat tindakan medis lebih tinggi dari kelas peserta karena penyakit yang diobati kategori katastropik, seperti jantung, stroke dan kanker paru-paru. Tahun lalu klaim pengobatan penyakit katrastopik mencapai Rp 20,28 triliun. Dengan diatur PNPK penyakit katastropik, Pahala menaksir bakal mengurangi potensi pelayanan yang tidak diperlukan lima hingga 10 persen atau sebesar Rp 2,28 triliun.

KPK juga merekomendasikan Kementerian Kesehatan mengimplementasikan patungan dalam pembayaran (co-payment) untuk peserta mandiri yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2018. Skemanpatungan pembayaran ini adalah upaya untuk meminta kepada peserta yang mampu menanggung 10 persen dari biaya kesehatan. Selama ini, klaim dari peserta mandiri justru jauh lebih besar dari penerimaan iurannya. Pada 2018, misalnya, tercatat total klaim dari peserta mandiri mencapai Rp 22 triliun. Skema co-payment,

akan menghemat pengeluaran BPJS Kesehatan sebesar Rp 2,2 triliun.

Rekomendasi selanjutnya, pemerintah segera menertibkan penetapan kelas rumah sakit. Hal ini berdasarkan temuan pada 2018, yakni empat dari enam rumah sakit tidak sesuai kelas sehingga mengakibatkan pemborosan pembayaran klaim sebesar Rp 33 miliar per tahun. Temuan ini hasil dai kunjungan KPK, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan ke enam rumah sakit di Palembang, Manado, Balikpapan, dan Jawa Barat.

Tindak lanjut kunjungan ini, Kementerian Kesehatan kemudian melakukan review terhadap 7.000 rumah sakit. Hasilnya, Kementerian Kesehatan menemukan 898 rumah sakit yang tidak sesuai dengan kelasnya. Untuk melakukan penurunan kelas rumah sakit, Kementerian Kesehatan harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kesehatan pemerintah daerah. Penertiban kelas rumah sakit ini diproyeksikan bisa menghemat Rp 6,6 triliun per tahun. "Dulu sudah ada surat Menteri Kesehatan Bu Nila Moeloek. Menteri yang sekarang tinggal meneruskan," ucap Pahala.

Pahala mengatakan BPJS juga bisa menekan defisit dengan menerapkan kebijakan *Coordination of Benefit* (CoB) dengan asuransi kesehatan swasta. Peserta yang juga menggunakan asuransi swasta selain BPJS Kesehatan bisa menggabungkan manfaat keduanya ketika sakit

Berdasarkan data Dewan Asuransi Indonesia, sekitar 4,5 juta atau 10 persen penerima upah yang mengikuti BPJS memiliki asuransi. Pahala mencontohkan Korea Selatan dan Jepang klaim BPJS, 20-30 persennya bisa dibagi dengan asuransi swasta. "Tugas pemerintah untuk segera mengakselerasi dan duduk dengan asuransi swasta menyelesaikan *Coordination of Benefit*," ujarnya.

Rekomendasi terakhir, KPK menganjurkan untuk mengaitkan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan pelayanan publik. Misalnya saja, untuk bisa memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), salah satu syaratnya adalah orang tersebut telah membayar iuran BPJS Kesehatan.

Selama melakukan kajian, tim KPK juga menemukan *fraud* atau tindakan curang yang terus-menerus terjadi. Berdasarkan tinjauan lapangan, tim KPK menemukan masih terdapat kekurangan di sistem pembayaran klaim ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) oleh BPJS Kesehatan. Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 40 tahun 2018 tentang Alur dan Standar Waktu Penyelesaian Klaim Manfaat Pelayanan Kesehatan BPJS menyebutkan bahwa pembayaran klaim dilakukan sesuai dengan urutan jatuh tempo klaim (*first in first out*).

Dalam implementasinya, proses pembayaran klaim ke FKRTL dengan FIFO masih manual. Untuk klaim FKRTL, proses dimulai dengan bagian keuangan setiap kantor cabang membuat cash forecasting setiap minggu yang akan dilaporkan ke bagian treasury di BPJS Kesehatan Pusat. Proses pengiriman cash forecasting ini masih menggunakan pengiriman melalui aplikasi chat (Telegram) oleh bagian keuangan kantor cabang yang akan direkap BPJS Kesehatan Pusat. BPJS Kesehatan Pusat yang kemudian akan menentukan klaim mana saja yang akan dibayarkan terlebih dahulu, diurutkan berdasarkan tanggal pengajuannya berdasarkan kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Tim KPK menemukan masih banyak ketidaksesuaian sistem FIFO pada tanggal pembayaran.

Dengan masih manualnya sistem pembayaran klaim ke FKRTL, sangat dimungkinkan terbukanya celah kecurangan. Berdasarkan tinjauan lapangan tim KPK, proses negosiasi dari rumah sakit ke BPJS Kesehatan mungkin terjadi untuk menentukan klaim mana yang didahulukan untuk pembayarannya melalui proses pengajuan yang masih

manual tersebut. Hampir semua rumah sakit berusaha untuk meyakinkan kantor cabang bahwa kondisi keuangan mereka kesulitan jika tidak dibayar segera. Karena itu, KPK merekomendasikan BPJS Kesehatan memperbaiki sistem verifikasi klaim, baik aplikasi bantu maupun personilnya, melakukan pembersihan data dan audit terhadap klaim anomali, dan sentralisasi sistem pembayaran klaim BPJS Kesehatan dilakukan oleh Kantor Pusat, dengan menggunakan aplikasi yang sudah dibangun yaitu Sistem Monitoring Kas (Monika).

BPJS juga belum optimal dalam penagihan iuran. Akar persoalannya, tidak adanya mekanisme yang memaksa dalam penarikan iuran peserta, upaya membundel pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional dengan layanan publik lainnya belum optimal, dan tidak adanya pemrofilan kesejahteraan dalam pendaftaran peserta mandiri.

Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan lembaganya telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan defisit. Setidaknya ada empat solusi komprehensif untuk menyelesaikan masalah finansial BPJS Kesehatan, yakni menyesuaikan besaran iuran, memaksimalkan penagihan iuran (kolektibilitas), mencegah moral hazard peserta dan kecurangan (*fraud*) oleh rumah sakit, dan meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013, dalam kondisi Dana Jaminan Sosial defisit, pemerintah memiliki tiga pilihan untuk melakukan tindakan khusus, yaitu dengan menyesuaikan iuran, menyesuaikan manfaat, atau memberikan suntikan dana. "Tiga pilihan tersebut harus dilakukan secara bersamaan dan terintegrasi," ujar Iqbal. Bukan hanya pemerintah yang berkewajiban menyuntikkan dana, menurut dia, namun juga harus muncul kesadaran bersama bahwa menaikkan iuran dan menyesuaikan manfaat layanan melalui pengaturan pelayanan suatu hal yang harus diterima masyarakat apabila program yang terbukti sangat baik ini tetap akan berlanjut berkesinambungan.

Adapun Presiden Joko Widodo telah merespons surat KPK mengenai rekomendasi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan pada awal Juni lalu. Presiden melalui Sekretariat Negara meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri segera menindaklanjuti temuan KPK.\*

# LANCAR LUNCUR KORUPSI PROYEK AIR MINUM

Ada-ada saja ulah pejabat publik dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi. Di tengah kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap pengelolaan dan penyediaan air minum, termasuk di beberapa wilayah bencana, mereka justru menyalahgunakan posisi dan kewenangannya untuk menerima suap dari pihak swasta yang mengerjakan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR.

# PENETAPAN TERSANGKA

# **28 Desember 2018**

- Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis di Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
- 2. Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Strategis Wilavah IB
- Teuku Mochamad Nazar, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Darurat Permukiman Pusat
- 4. Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Strategis II A

# 25 September 2018

- 1. RIZ, anggota BPK RI
- 2. LJP, Komisaris Utama PT. Minarta Dutahutama

# Suap Untuk Memuluskan Proyek

- Mengatur Pemenang Lelang
- PT WKE dan PT TSP terpilih sebagai pemenang lelang 12 paket proyek di Kementerian PUPR terkait proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018, total proyek Rp429 miliar
- Membagi Jatah Pengerjaan Proyek
- PT WKE mengerjakan proyek di atas Rp50 miliar, sedangkan PT TSP mengerjakan di bawah Rp20 miliar
- Membagi Jatah Suap
- PT WKE dan PT TSP diminta memberikan komisi 10% dari nilai proyek, 7% untuk Kepala Satker dan 3% untuk PPK.
   Suap diberikan saat proses lelang, dan sebagian lainnya saat pencairan dana dan penyelesaian proyek.
- Mempermudah pengawasan dan Memperlancar pencairan anggaran
- PPK memberikan kemudahan dalam pengawasan kegiatan proyek di lingkungan Satker PSPAM Strategis di Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Sehingga dapat memperlancar pencairan anggaran kegiatan yang dikerjakan PT WKE.

# **Proyek-Proyek Sumber Suap**

- Proyek Pembangunan SPAM PDAM Binaan (Katulampa) Kota Bogor tahun 2017-2018.
- Proyek pembangunan SPAM IKK Balai Riang Kabupaten Sukamarah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Proyek pembangunan SPAM IKK Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Proyek Pembangunan SPAM IKK Sambang Makmur Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Proyek IPA Semboja Kalimantan Timur.
- Proyek-proyek di SPAM di Aceh diantaranya proyek IPA Air Bukit di NAD.
- Proyek penanganan Tanggap Darurat SPAM Sulawesi Tengah 2018 yang berlokasi di Donggala Sulawesi Tengah.
- Proyek pekerjaan Pengadaan Pipa dan Accessories Kebutuhan Keadaan Darurat 2018 yang berlokasi di Kota Bekasi Jawa Barat

# MENERIMA PENGEMBALIAN UANG TERKAIT PERKARA

62 orang pejabat di Kementerian PUPR dan pihak lainnya telah mengakui menerima dan mengembalikan uang dengan total Rp26,74 Milyar



**TOTAL BARANG BUKTI OTT** 

# RP3,58 MILIAR

Terdiri dari

Rp3,36 miliar SGD23.100 USD3.200

> Uang tersebut diamankan oleh tim KPK saat bergerak ke Gedung Satker PSPAM Kementerian PUPR, Benhil, Jakarta.

# INKRAH \_



Mantan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana

# PERKARA

Pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit (RS) Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana pada 2009

# VONIS

Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan



# Liliana Hidayat

Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia

# PERKARA

Suap penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing (WNA)

### ONIS

Pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan



# Fahmi Darmawansyah

Terpidana/Tahanan

# PERKARA

Suap terkait fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin

### VONIS

Pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan



# **Andri Rahmat**

Perantara (tahanan pendamping Fahmi Darmawansyah)

# PERKARA

Suap terkait fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin

## VONIS

Pidana penjara 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan



# Yusriansyah Fazril

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/PPNS

# PERKARA

Suap penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing (WNA)

### VONIS

- Pidana penjara 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan
- 2. Pidana tambahan membayar uang pengganti Rp121,1 juta subsider 2 tahun kurungan



# Kurniadie

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/ PPNS

# PERKARA

Suap penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing (WNA)

### ONIS

- Pidana penjara 5 tahun dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan
- 2. Pidana tambahan membayar uang pengganti Rp824 juta subsider 4 tahun kurungan



# PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk

Korporasi

### PERKARA

Menerima keuntungan 8 proyek pemerintah yang diperoleh dari Muhammad Nazaruddin dengan total keuntungan Rp240,098 miliar

### VONIS

- 1. Pidana denda Rp700 juta
- 2. Pidana tambahan membayar Uang Pengganti Rp85,49 miliar
- Pidana tambahan pencabutan hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 (enam) bulan kurungan

# Wahid Husein

Mantan Kepala Lapas Sukamiskin

### PERKARA

Suap terkait fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin

### VONIS

Pidana penjara 8 tahun dan denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan



SINIAR

# SETULUS HATI BENING



Perjalanan bukan melulu soal mengunjungi tempat baru dan berswafoto. Perjalanan justru jadi salah satu cara menemukan jati diri. Itulah

tujuan Bima melakukan perjalanan diusianya yang belia, 22 tahun. Pemuda Jakarta ini memang punya cita-cita tamat kuliah tepat waktu, agar bisa menjelajah bumi pertiwi. Setahun perjalanan itu direncanakannya, sebelum masuk dunia kerja. Semangatnya menyala ingin belajar langsung dari kehidupan masyarakat yang ditemuinya.

Perjalanan itu dimulai dari salah satu terminal bis di Jakarta...

Deru mobil menjauh menyisakan kepulan asap. Bima berdiri di jalan sepi. Hutan pinus di kiri kanan jalan membuat suasana sore menjadi lebih gelap. Ini konsekuensinya saat Bima bersitegang dengan kenek bus yang ditumpanginya. Ia menolak membayar uang lebih banyak dari harga tiket yang tertera untuk perjalanannya. Bima benci dipalak. Dia menolak menyerah, walau ia harus turun di tengah jalan.

Di jalan sepi itu, Bima bertemu dengan Nek Ijah, seorang wanita tua yang sedang mencari daun jati untuk membungkus tape jualannya. Nek Ijah mengajak Bima untuk mampir ke desanya, Desa Wonosegoro. Bima akhirya ikut ke rumah Nek Ijah yang tinggal dengan cucunya, Bening.

Dari sinilah catatan Bima bermula.

Sesampainya di rumah Nek Ijah, Bima bertemu dengan Bening, Cucu Nek Ijak. Gadis cantik kelas 2 SMK ini ditinggal ayahnya bekerja di Jakarta, setelah kanker rahim merenggut nyawa ibunya.

"Jadi sebenarnya tujuan Mas Bima ini mau kemana?" Tanya Bening.

"Sebenarnya Aku tidak ada tujuan. Aku sengaja melakukan perjalanan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup. Jadi dimana Aku singgah, Aku berharap bisa menemukan pengalaman yang berharga. Pengennya saat pulang menjelajah nanti, Aku bisa *bikin* buku yang berisi perjalananku." Jelas Bima

Begitulah perkenalan Bima dengan Bening. Dari perkenalan itu pula, Bima tahu Bening sosok gadis yang cerdas dan peduli. Di usianya yang belia, Bening tak larut dalam kehidupan remaja yang manja dan penuh romansa, dia malah aktif di radio komunitas. Siarannya

tidak hanya berisikan hiburan, tapi juga memberikan berbagai informasi terkait tips kesehatan, solusi masalah pedesaan, info pembangunan daerah, dan membahas juga mengawasi penggunaan dana desa.

Tak terasa, malam mulai larut. Suasana desa begitu tenang dan lengang. Sepi. Menikmati malam, Bima, Nek Ijah dan Bening duduk di teras rumah. Nek Ijah menjelaskan kepada Bima, bahwa Desa Wonosegoro sebentar lagi masuk musim pemilihan kepala desa. "Biasanya jadi banyak hal yang aneh-aneh, seperti hantu gentayangan yang ramai dibicarakan warga desa." Ucap Nek Ijah.

Hantu?

"Apa hubungannya pemilihan kepala desa dengan hantu gentayangan?" Tanya Bima heran.

Nek Ijak dan Bening menjelaskan di desa memang ada saja hal yang tak masuk akal. Begitulah mereka menutup malam pertama Bima di Desa Wonosegoro.

Ketegangan muncul di Desa Wonosegoro karena ada calon kepala desa (kades) yang berprilaku curang. Demi kesampaian jadi kades, Bahrudin mengerahkan segala upaya menarik hati warga. Lewat Agus anaknya, Bahrudin minta mengudara di rakom tempat Bening bersiaran. Tak mau ditikung calon kades lainnya, Bahrudin nekat ingin membeli jam siaran, asal calon lain tak ada yang mengudara.

Istri Bahrudin pun tak kehilangan akal merayu Nek Ijah. Istri Bahrudi membeli dagangan Nek Ijah dengan syarat, saat pemilihan kelapa desa nanti, nek ijah dan keluarga pilih Pak Bahrudin suaminya. "Nanti kalo suami Saya benaran jadi kades, Nek Ijah pasti akan terjamin kesejahteraan hidupnya." Janjinya.

"Maaf bu bahrudin saya ndak biasa

terima uang seperti ini." Jawab Nek Ijah sungkan. Kesal dengan penolakan Nek Ijah, Istri Bahrudi membatalkan niatnya membeli dagangan Nek Ijah. Dia lantas berlalu dengan angkuh, meninggalkan Nek Ijah tertegun heran. "Orang begitu kok mau jadi penguasa, bisa ancur desa ini nanti," gumam Nek Ijah.

Sesampainya di rumah, Nek Ijah menceritakan pertemuannya dengan Istri Bahrudin kepada Bima. Nek Ijah khawatir, kalau kehendak Baharudin ditolak, Dia akan melakukan hal-hal nekat karena tak bisa ditolak. Nek Ijah membuat Bima kagum. Walau hidupnya tak mudah, Nek Ijah tetap memegang prinsipnya. "Harta tidak dibawa mati. Mending oleh batik sitik ning enak di pangan, mending dapat sedikit tapi enak dinikmati." Senyum Nek Ijah sambil membenarkan bungkusan tape.

Sementara itu Bahrudin terus berusaha menarik hati warga. Bersama Istrinya, Bahrudin datang ke mesjid dan bertemu Saidi, Marbod Mesjid. "Aku mau ngasih sumbangan takjil, makan kecil dan bingkisan untuk jamaah. Tolong sampaikan sama Kiai Tahirin, Aku mohon doa dari semua jamaah mesjid sini, saat pengajian besok ya. Pahamkan Pak Saidi?" Kata Bahrudin.

"Suami saya ini kan lagi nyalon kades, ya mohon didoakan agar keinginannya terkabul dan mohon dukungan dari jamaah mesjid sini." Tambah Istrinya.

"Tapi anu, Saya yakin Kiai Tahirin tidak mengizinkan mesjid jadi ajang kampanye, Pak, Bu. Kalo mau nyumbang, nyumbang saja, ndak harus ada pamrih yang lain toh." Jawab Saidi pelan.

Berkali-kali usahanya menarik hati warga gagal, Bahrudin sekeluarga mulai kesal. Agus bahkan langsung melabrak Bima di rumah Nek Ijah. "Nek Ijah, jangan terpengaruh dengan sikap sok baik Bima. Sebagai orang desa, kita harus waspada dengan orang dari luar desa kita. Apalagi sekarang sedang musim pilkades, banyak penyusup yang bisa menyusup ke desa kita." Teriak Agus.

Tak terima dituduh Agus, Bima meminta Agus tidak memfitnahnya dan menjelaskan bahwa dia hanya singgah di Desa Wonosegoro. Saling sahut tak terelakan antara Agus dan Bima. Sampai ujungnya Agus menuduh Bima mempengaruhi Bening untuk menolak kampanye Bapaknya di rakom. Bima membantahnya. Tapi Agus tetap bersikeras Bima telah memberi pengaruh buruk kepada Bening. Sebelum pergi, Agus mengancam Nek Ijah untuk mengusir Bima sebelum warga yang mengusirnya.

Gentarkah Bima mendengar ancaman Agus?

Dengarkan selengkapnya kisah perjalanan Bima di Desa Wonosegoro di Podcast Sandiwara Radio Catatan Bima, Episode Setulus Hati Bening pada Spotify Kanal KPK di Podkes Kanal KPK.

Sampai jumpa.

# HUKUM ADAT PENCEGAH KORUPSI

etiap tahun, pemerintah mengalokasikan begitu banyak uang untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa di seluruh Indonesia. Tahun 2020, pemerintah memberikan 34 persen dari total belanja negara yaitu Rp858,8 Triliun. Angka ini meningkat 5,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Namun, besarnya uang rakyat yang dibagikan secara merata ke 74.517 desa dan 919 nagari itu seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Data Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa selama tahun 2015-2018 ada 252 kasus korupsi Dana Desa.

Namun, besarnya uang rakyat yang dibagikan secara merata ke 74.517 desa dan 919 nagari itu seringkali

disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Data Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa selama tahun 2015-2018 ada 252 kasus korupsi Dana Desa.

Melihat rawannya korupsi Dana Desa, Pemerintah di lingkungan Nagari Situjuah Batuah memiliki cara tersendiri untuk mencegah korupsi Dana Desa, yaitu dengan menerapkan hukuman adat bagi pelakunya.

Nagari yang terletak di Provinsi Sumatera Barat itu menerbitkan Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, STYLING BY : Tim litbana KPK asdasdadaddaddas



Kolusi, dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Peraturan ini memiliki naskah akademik yang disempurnakan oleh Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

Menurut Wali Nagari Situjuah Batua Dhon Vesky Datuk Tan Marajo, Nagari Situjuah Batuah adalah desa pertama yang membuat peraturan Nagari mengenai pencegahan korupsi berbasis hukum adat.

"Kami desa pertama di Indonesia yang membuat Peraturan Nagari atau Peraturan desa tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berbasis hukum adat," ujar Tan Marajo seperti yang dikutip dari situs Covesia.com.

Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah Nagari Situjuah Batua memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Selain itu, dalam rangka pencegahan korupsi aparat pemerintah Nagari Situjuah Batua juga wajib tertib administrasi, pelaporan, dan pengembalian keuangan negara dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

"Jika mereka tidak tertib, ada tiga jenis sanksi adat yang akan dijatuhkan terhadap pelanggaran Peraturan Nagari Situjuah Batua tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme."

Pertama, Pangke Pucuak atau hukum adat sumbang salah yang berlaku di masyarakat adat nigari. Ini adalah kategori

hukuman yang paling ringan. Sanksi kedua, Kabuang Batang atau hukum adat yang berlaku di nagari sebagai bentuk hukuman yang menengah.

Sanksi ketiga, Kakeh Urek atau hukum adat yang berlaku di nagari yang bersifat hukuman berat.

Selain tertib administrasi, Peraturan Nagari itu juga mewajibkan aparat pemerintah memberikan laporan mengenai alokasi Dana Desa secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Karena, pengelolaan Dana Desa di Nagari Situjuah Batuah tak hanya diawasi oleh Inspektorat dan penegak

Selain tertib administrasi, Peraturan Nagari itu juga mewajibkan aparat pemerintah memberikan laporan mengenai alokasi Dana Desa secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

hukum, tapi juga dikawal masyarakat.

Bahkan, sebagai bentuk transparansi penggunaan dana desa, pemerintah Nagari Situah Batuah juga membuat Peraturan Wali Nagari tentang Keterbukaan Informasi.

Setiap hari Jumat setelah gotong royong, pemerintah selalu menyampaikan pengumuman tertulis yang dibacakan di seluruh masjid di Nagari Situjuah Batua mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Selain sosialisasi ke masjid dan mushalla, pemerintah setempat juga menyampaikan Anggaran Perencanaan Belanja Nagari Situjuah Batua melalui baliho dan running text yang terdapat di pusat Nagari Situjuah Batua.

Di tahun 2020, Tan Marajo berencana untuk membuat papan pengumuman APB Nagari Situjuah Batua di setiap warung dan sarana umum.

"Agar semakin dapat diakses masyarakat," ujar Tan Marajo.

# PENYELAMAT TERBESAR BUMI ADALAH KITA

# Nadine Chandrawinata

Founder Sea Soldier

alam sebuah jurnal berjudul Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean, Indonesia berada di posisi nomor dua setelah China sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di laut. Dalam jurnal tersebut, grup penelitian Jambeck mengatakan bahwa Indonesia telah menyumbang 187,2 juta ton sampah plastik di lautan.Laut menjadi hilir dari segala permasalahan yang terjadi di daratan, termasuk sampah. Sangat berbahaya bila semakin hari semakin banyak sampah plastik yang mencemari laut hingga mengancam biota laut. Selain berbahaya bagi biota laut, keberadaan sampah plastik di laut kelak akan membahayakan manusia. Bagaimana tidak, tubuh ikan yang kita makan bisa mengandung mikro plastik akibat ikan-ikan itu tak sengaia menelan plastik.

Karena itu, menjaga lingkungan adalah kewajiban setiap manusia yang tinggal di bumi. Nadine Chandrawinata begitu khawatir melihat perilaku manusia yang kerap kali menilai bahwa menjaga lingkungan adalah sebuah pilihan, bukan kewajiban. Padahal menurutnya, penyelamat terbesar bumi adalah manusia itu sendiri.

Berikut dialog Integrito bersama Nadine mengenai kepeduliannya dengan laut hingga membuat gerakan Sea Soldier;

# TATAPMUKA

Apa yang menjadi latar belakang Nadine dan Dinni (founder gerakan Sea Soldier) membuat gerakan Sea Soldier yang fokus untuk menyelamatkan laut?

Sebenernya Sea Soldier terbentuk bukan karena bicara tentang laut saja. Tapi kita mengambil konsep bahwa air mengalir dari hulu ke hilir. Hulu adalah daratan, hilir adalah lautan.

Kenapa aku ingin mengangkat tentang laut Indonesa, karena ruang main ku laut dan kita merupakan negara kepulauan yang mana banyak sampah berakhir di laut kita. Jadi yang harus diubah adalah pola hidup kita yang ada di daratan.

Saya bersama teman saya Dinni Septia Ningrum. Dia memang fokus di edukasi, pendidikan di desa tertinggal. Jadi kita coba mengkolaborasikan apa yang kami khawatirkan.

Kita melibatkan bagaimana mengubah pola hidup yang lebih bijak lewat edukasi dengan pembingkaian kegiatan yang fun. Kegiatan indoor atau outdoor, baik yang formal atau yang informal.

Saya dan partner saya mengangkat kekhawatiran kita tentang lingkungan. Karena biasanya orang berpikir menjaga lingkungan adalah sebuah pilihan. Tetapi kita harus berpikir kalau ini sebuah kewajiban untuk menjaga lingkungan karena kita berada di dalamnya.

Karena perusak terbesar adalah kita, tapi penyelamat terbesar adalah kita juga. Kalau bumi ini hilang, ya artinya kita enggak akan ada tempat tinggal lagi. Jadi itu sebuah kewajiban kita harus menjaga lautan dan daratan kita.

# Moment yang membuat Nadine dan Dinni mengambil keputusan untuk membuat sebuah gerakan?

Momentnya saat Dinni menjalani kegiatan 1000 Guru. Dia memang sama seperti saya, pada saat itu saya lagi travelling, diving, kemudian saya presentasi. Saya dan Dinni berada di posisi vang sama, vaitu sebagai pendatang.

Setelah kita mengedukasi orang di sana, berbagi pendidikan, kita balik lagi ke Jakarta. Ini tidak efektif. Karena pada saat kita pulang, yang di daerah itu kembali lagi. Karena itu titik nyamannya mereka. Kalau enggak dipantau, ya mereka balik lagi.

Pemicunya adalah gimana caranya kita bisa tetap konsisten dan punya tolak ukurnya, punya barometernya. Gimana kalau kita punya leader di setiap regional.

Akhirnya sekarang Sea Soldier sudah ada di 14 kota. Mereka sendiri yang meminta untuk menjadi leader regionalnya.

Kita mau Sea Soldier regional ini mandiri. Kita bantu awalnya dengan cara memberikan semua ilmu yang kita punya, kemudian selebihnya mereka cari sendiri. Kita juga bantuin mereka membuat program.

Ada 4 program yang harus dijalankan oleh 14 regional.

Salah satunya sirkus lumba-lumba keliling, menanam melawan kepunahan, mangrove untuk mengurangi abrasi, dan bersihkan warungku. 4 program ini dijalankan oleh Sea Soldier regional tapi dikemas dengan budayanya masing-masing.

Sekarang sirkus lumba-lumba keliling akhirnya sudah ada undang-undangnya. Akhirnya berhasil selama lima tahun bekerjasama dengan teman-teman NGO yang lain.

# Bagaimana cara Nadine untuk menjaga jaringan relawan Sea Soldier?

Trigger awalnya adalah kita bicara lewat gelang. Dengan warna putih, merah, biru. Merah putih artinya Indonesia, biru adalah negara kepulauan, laut kita, di kepang artinya kerjasama, gotong royong, lalu mendapatkan glory yaitu dapat warna

Semua punya pengingat dan komitmen kalau melihat gelang itu. Kenapa gelang karena paling gampang dan pengingat yang paling ringan.

Sea Soldier ini bukan sebuah komunitas, kita awalnya sebuah gerakan #SeaSoldier yang berbicara di social media. Kita buat konsep berbagi tentang gimana cara kalian untuk menjaga bumi. Kita selalu bilang Sea Soldier ini komitmen diri sendiri. bukan komunitas.

# Sudah berapa banyak relawan Sea Soldier?

Jujur aku enggak tau, tapi kalau dari gelang yang bernomor itu sekitar 400. Dan yang dijual sudah lebih dari 2000 gelang.

Apakah nama besar Nadine sebagai public figure memiliki pengaruh yang besar dalam gerakan ini?

Dengan orang lebih mengenal aku siapa, mereka mengenal aku karena nama dan apa yang sudah aku lakukan, itu membuat aku lebih gampang membuat suatu perubahan. Perubahan itu harus diawali dengan diri ku sendiri. Aku mencoba menanamkan, dan orang lain bisa menilai.

Pada saat aku berbicara tentang apa yang aku lakukan, itu menjadi bukti nyata bahwa siapapun bisa melakukan.

# Saat terjun ke lapangan, ada hal yang tak terlupakan?

Waktu itu di Samalona. Pas lagi Diving aku denger suara besar sekali, tiga kali. Aku kira orang buang jangkar, ternyata itu suara bom. Terus pada saat aku udah selesai diving, aku jalan di tepi pantai. Aku melihat banyak baby shark yang *enggak* ada siripnya. Jadi memang siripnya diambil. Memang itu miris.

Moment itu sangat klimaks karena aku mengingat yang terjadi, mendengar bom saat diving. Tapi saat itu lagi moment sunset, dan sunset-nya lagi bagus banget. Kayak sebuah keindahan alam tapi keegoisan manusia membuat kerusakan. Jadi itu menyentuh banget buat aku.

### Tanggapan Nadine menaenai pengelolaan laut di Indonesia?

Aku yakin Indonesia sudah melakukan ketentuan-ketentuan, ketegasan, pasti sudah ada pilar. Tapi memang kita ini negara kepulauan, luas banget. Menurut ku Indonesia ini unik banget, pulaunya menyebar. Enggak ada negara lain yang memiliki pulau sebanyak kita dan tersebar.

Kalau aku melihat jumlah polisi laut, kayaknya polisi darat masih lebih banyak. Butuh lebih banyak polisi lautnya karena kita negara kepulauan. Potensi sumber daya alam kita terlalu banyak sehingga enggak bisa dijaga semuanya. Itu yang harus dijaga sebelum hilang satu persatu.

# Hal yang paling utama harus dilakukan pemerintah?

### Menambah pengawasan laut. Membuat ketegasan keras untuk kelautan. Kenapa?

Salah satu yang bisa dilihat seperti sirkus lumba-lumba keliling. Doplhin memang bukan salah satu binatang yang langka, tapi perilaku Indonesia terhadap lumba-lumba menurut ku tidak baik dan tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk negara lain. Tinggal Indonesia yang masih melakukan sirkus lumba-lumba keliling. Itu tidak baik bagi image Indonesia di mata dunia.

Setelah beberapa tahun, kita dorong terus, dan mengangkat fakta-fakta. Aku harus menyamar dulu untuk bisa masuk ke sirkus lumba-lumba keliling. Karena temanteman ku fotonya sudah dipajang dan dilarang masuk.

Akhirnya kita dapat undang-undangnya sekarang.

Jadi yang kita perjuangkan sedikit lama, baru dapat. Tapi at least ada perubahan untuk Indonesia. Karena kalau enggak dijaga apa yang sudah ada, lama-lama akan hilang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjaga apa yang masih kita bisa jaga.

# Target Sea Soldier?

Targetnya enggak muluk-muluk. Kalau ada yang kita fokusin di satu isu, harus ada perubahan. Sekarang Sea Soldier lagi fokus untuk merubah pola hidup yang memilah sampah. Menurut ku, kita bisa membantu mengurangi sampah sebeum sampai ke titik terakhir, yaitu TPA.

Mungkin banyak orang yang belum tau, untuk mengurangi penyakit di dalam rumah, sebelum masuk ke tong sampah, semua sampah itu harus dicuci. Lalu memilih sampah makanan dan sampah yang bisa di daur ulang. Karena sampah yang sudah dipisah bisa dipakai, bisa didaur ulang lagi dan menjadi nilai ekonomi bagi pemulung.

### **BIODATA**

### NAMA

Nadine Chandrawinata

# TEMPAT, TANGGAL LAHIR

Hannover, Germany, 8 Mei 1984

### KARIER

Founder and Executive Director of Seasoldier

Puteri Indonesia 2005

Bachelor of Advertising, London School of Public Relation

"The World Coral Reef Triangle Center" Wakatobi's ecotourism Ambassador

Maluku Barat Daya ecotourism Ambassador

Autism Ambassador

### **MEMBER OF**

UNICEF

Jakarta Aid Animal

**WWF Warrior** 

Change.org

COREMAP Indonesia Seasoldier

44



Gus Sholah

# INSINYUR NUJADI GURU BANGSA

SEORANG DARAH BIRU NAHDATUL ULAMA, MENDOBRAK TRADISI MASUK SEKOLAH INSINYUR. MEMBANGUN KARIER DI DUNIA ARSITEKTUR HINGGA TERJUN KE POLITIK. KINI, SOSOKNYA DIKENANG BANYAK UMAT. JADI TELADAN KARENA PERSATUAN BANGSA YANG IA RAWAT.

us Sholah mendapat gelar sebagai insinyur pada tahun 1962 setelah menyelesaikan pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB), Gus Sholah membuat banyak orang terpana padanya. Bukan sekedar karena ia seorang cucu pendiri Nahdatul Ulama (NU), Tapi juga karena kecerdasannya membuat ia lebih menonjol dibandingkan yang lain.

Lahir di kota santri, Jombang, Jawa Timur, Gus Sholah justru tidak mengenyam pendidikan di pesantren. Ia menempuh pendidikan dasarnya di SD KRIS atau Sekolah Dasar Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, di mana para gurunya banyak yang menjadi anggota pergerakan, termasuk orang-

orang komunis. Dari sinilah asal mula la terbiasa hidup di lingkungan yang heterogen.

Sekitar tahun 1955-1958, la melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri I Cikini. Lalu ia melanjutkan di SMA Negeri 1 Jakarta yang populer dengan sebutan SMA Budut (Budi Utomo), hingga memilih kuliah jurusan arsitektur di ITB.

Meski begitu, K.H Salahuddin Wahid, begitu nama lengkapnya, semasa kecil bersama saudara-saudaranya juga belajar mengaji. Ini merupakan aktivitas rutin yang wajib dilakukan setiap hari. Ketika ayahnya masih hidup, kegiatan mengaji dipimpin langsung oleh sang ayah. Setelah Kiai Wahid Hasyim wafat, tugas itu diambil alih oleh sang ibu. Gus Sholah remaja juga belajar dari KH. Bisri Syansuri yang sering ke Jakarta. Selain belajar membaca Al-Qur'an, ia juga belajar figh, nahwu, sorof, dan tarikh.

Gus Sholah sempat merasakan pendidikan pesantren melalui Pesantren Ramadhan. Selama beberapa kali

"Kepandaian reguler tidak ada gunanya kalau tidak jujur. Yang ada nanti menjadi koruptor dan menipu bangsa sendiri,"

# - Gus Sholah -

liburan sekolah di bulan Ramadhan, ia belajar ke Pesantren Denanyar Jombang bersama adiknya, Umar Wahid. Namun, menginjak usia dewasa, cara yang ditempuhnya untuk belajar agama adalah dengan membaca sendiri buku-buku keagamaan.

la menyadari banyaknya anggapan tentang ilmu agama yang bertentangan dengan ilmu sains. Oleh karena itu, la ingin menepis anggapan keliru tadi dengan mengatakan bahwa sains dan Ilmu Agama bisa berjalan beriringan. Baginya yang terpenting ialah kejujuran, la bahkan pernah bilang pada para santri, siswa dan komunitas di Pondok Pesantren di Tebuireng, bahwa "Kepandaian regular tidak ada gunanya kalau tidak jujur. Yang ada nanti menjadi koruptor dan menipu bangsa sendiri."

Perjalanan panjang hingga memainkan berbagai peran

telah la lalui. Sejak masih kuliah, di tahun 1970, la membuka perusahaan kontraktor bersama dua temannya dan kakak iparnya, Hamid Baidawi, perusahaan itu bertahan hingga tahun ketujuh. Sejak saat itu hingga 1997, aktivitas yang la lakukan tersebut mengantarkannya aktif di berbagai asosiasi bidang konstruksi.

Beberapa jabatan pernah diembannya, seperti Ketua DPD Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo) DKI (1989-1990), Sekretaris Jenderal DPP Inkindo (1991-1994), dan lain sebagainya. Namun, pada 1997, langkahnya harus terhenti untuk melanjutkan bisnis konstruksi akibat krisis keuangan Asia. Lantas la masuk dan intens di bidang politik.

Mulai dari kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 1998, bergabung dengan Partai Kebangkitan Ummat (PKU), lalu lolos dan terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) periode 2002-2007. Selama menjalani tugas di Komnas HAM, la sempat memimpin TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) untuk menyelidiki kasus Kerusuhan Mei 1998 (Januari-September 2003), menjadi Ketua Tim Penyelidik Adhoc Pelanggaran HAM Berat kasus Mei 1998, serta Ketua Tim Penyelidikan Kasus Pulau Buru, dan banyak lainnya.

Sejak saat itu namanya semakin popular, hingga ia diumumkan sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) di awal mula sejarah Pilpres yang dilakukan secara langsung pada 2004. Ia berdampingan dengan Wiranto, namun kalah.

13 April 2006, Gus Sholah resmi menjadi pengasuh Tebuireng. Selama kepemimpinannya, la berupaya menggugah kesadaran para guru, pembina santri, dan karyawan Tebuireng, untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja berdasar keikhlasan dan kerja sama

Selain menakhodai Tebuireng, la tak meninggalkan kegiatan lainnya, seperti tetap menjadi anggota Forum Pemantauan Pemberantasan Korupsi (2004), Barisan Rakyat Sejahtera (Barasetra), Forum



Indonesia Satu (FIS), Kajian Masalah Kepahlawanan yang dibentuk oleh IKPNI (Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia), dan lain-lain.

Sepanjang Karirnya, Gus Sholah adalah salah-satu tokoh yang getol memperjuangkan tegaknya sistem hukum dalam pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi beban berat KPK. Seringkali ia bahkan mendatangi gedung KPK untuk sekedar memberikan dukungan moril agar KPK tetap *garang* terhadap para koruptor.

Gus Sholah adalah cerminan dari figur asli Indonesia yang memiliki kualitas dan integritas kepemimpinan lintas profesi. Secara bersamaan ia bisa berprofesi sebagai pengusaha, pegiat sosial, pejuang HAM dan Ulama yang mengasuh puluhan ribu santri. Ragam profesi yang digelutinya dijalankan dengan baik tanpa harus meninggalkan tradisi kepesantrenan yang telah membesarkannya.

Januari 2020, la berjuang melawan sakit jantung yang telah lama diderita, hingga harus menjalani operasi ablasi di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta. Kondisinya tidak membaik setelah operasi dan beliau wafat pada pukul 20.55 WIB pada 2 Februari 2020 di rumah sakit. Beragam tokoh turut berbela sungkawa.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengaku kehilangan atas kepulangan K.H Salahuddin Wahid. Ia mengenang sosok pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang itu sebagai tokoh yang teruji, panutan, dan guru bangsa yang mendahulukan kepentingan bangsa.

Di rumah kediaman sang guru bangsa, di kawasan Pela Mampang yang bercat putih, pada 3 Februari 2020, Hidayat mengatakan bagaimana cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) itu begitu dicintai semua kalangan. Lintas ormas, lintas partai politik, lintas agama, dan lintas profesi merasa nyaman dengan almarhum. Mereka yakin, nama Salahuddin yang diberikan oleh ayahnya, KH Wahid Hasyim, adalah nama yang sangat tepat sebagai pemersatu umat.

"Beliau tidak pernah lelah untuk membagikan segala komitmen untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan keumatan, untuk menghadirkan Indonesia maju kepada siapa saja, sekalipun dengan ormas yang tidak sama dengan beliau," tuturnya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga mengenang Gus Solah sebagai sosok tokoh panutan yang selalu berbicara dan bekerja demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ia mengingatkan khalayak bahwa selama hidupnya, Gus Sholah sering menerima dan menampung keluh kesah dari beragam kalangan. Itu sebabnya, banyak komunitas menjadikan almarhum sebagai sosok pejuang martabat kemanusiaan.

"Dan almarhum melakoni peran itu tanpa pamrih. Dia menyuarakan berbagai persoalan melalui sejumlah tulisan yang dipublikasikan, serta tak segan menyampaikan kritik yang konstruktif," ujar Bambang.

Kini, kita hanya bisa mengenangnya melalui karya-karya tulisannya. Sejumlah karya Gus Sholah yang telah dibukukan, antara lain adalah: Negeri di Balik Kabut Sejarah (November 2001), Mendengar Suara Rakyat (September 2001), Menggagas Peran Politik NU (2002), Basmi Korupsi, Jihad Akbar Bangsa Indonesia (November 2003), Ikut Membangun Demokrasi, Pengalaman 55 Hari Menjadi Calon Wakil Presiden (November 2004).

# Kode Etik Baru, KPK Sambut Era Baru

Senin 2 Maret 2020 jadi tonggak baru bagi segenap Insan KPK. Senin itu Kelima Anggota Dewan Pengawas KPK hadir dan memaparkan perubahan Kode Etik KPK di Auditorium lantai 3 Gedung Juang KPK.

Penyusunan Kode Etik oleh Dewan Pengawas adalah bagian dari tugas Dewan Pengawas, yang tercantum dalam Pasal 37B Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menyusun dan menetapkan Kode Etik Pimpinan dan Pegawai KPK.

Membuka acara ini, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa kode etik disusun sebagai panduan perilaku hidup insan KPK. Kode Etik ini haruslah menjadi roh dan jiwa insan KPK dalam berperilaku sehari-hari, "Sehingga diharapkan tidak ada insan KPK yang melakukan pelanggaran kode Etik," katanya.

# KPK Lantik Enam Jaksa Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam jaksa penuntut umum di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (10/3). Pelantikan ini adalah salah satu upaya KPK untuk memperkuat fungsi penuntutan. Dengan penambahan ini, maka total JPU yang dimiliki KPK saat ini sebanyak 80 orang.

Enam jaksa baru itu, yakni Andry Lesmana, Eko Wahyu Prayitno, Januar Dwi Nugroho, Tony Frenky Pangaribuan, Surya Dharma Tanjung dan Yoyok Fiter Haiti Fewu.

Dalam pelantikan itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan agar keenam jaksa tersebut bekerja secara profesional dan menunjung tinggi integritas. Firli juga berpesan untuk selalu bersemangat di manapun seorang jaksa ditempatkan.

"Di setiap hidup selalu ada tantangan. Kita bertugas selalu ada tantangan. Demikian halnya dengan bergabungnya kalian di KPK akan mendapat tantangan baru," katanya.

# KPK Raih Penghargaan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh Penghargaan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tingkat KPPN (Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara) Jakarta VI dari Kementerian Keuangan, pada Selasa lalu (10/3).

KPK meraih skor IKPA 95,46, menyusul Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan skor 94,09 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 88,27 untuk kategori Nilai IKPA satuan kerja berpagu diatas Rp250 miliar.

Ada tiga kategori Nilai IPKA yang diganjar oleh Kementerian Keuangan, yaitu IKPA satuan kerja berpagu 0 hingga Rp100 miliar, IKPA satuan kerja berpagu diatas Rp100 miliar hingga Rp250 miliar. Kepala Bagian Perbendaharaan di Biro Perencanaan dan Keuangan KPK Muhamad Suryanto mengatakan, "Setiap tahun ada 300 lebih satuan kerja yang dinilai Kementerian Keuangan."

# KPK Bantu Sulsel Selamatkan Keuangan Daerah Rp6,9 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Sulsel yang telah melakukan penyelamatan aset dan keuangan daerah serta penertiban aset selama tahun 2019 senilai total Rp6,9 triliun. Selain itu, selama tahun yang sama Sulsel juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai total Rp447 miliar.

Capaian itu merupakan hasil pendampingan KPK terhadap Pemerintah

Provinsi Sulsel dan 24 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel selama tahun 2019.

Hal itu disampaikan dalam monev yang berlangsung pada Selasa (3/3) di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Disampaikan juga capaian monitoring for prevention (MCP) Pemda se-provinsi Sulsel dalam program koordinasi supervisi pencegahan terintegrasi (korsupgah) tahun 2019.

# **Kepatuhan LHKPN Nasional Masih 51,12** %

Hingga 28 Februari 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara nasional yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, BUMN dan BUMD masih 51,12%.

Dari bidang eksekutif, masih ada 289.322 wajib lapor yang belum melaporkan hartanya, sehingga tingkat kepatuhannya masih 49,36%. Kemudian, di bidang legislatif, dari 20.191 wajib lapor, baru 10.935 orang yang telah melaporkan hartanya. Secara persentase, tingkat kepatuhan LHKPN di bidang legislatif masih 51,16%.

Sementara itu, di bidang yudikatif telah mencapai tingkat kepatuhan 88,69%. Dari total 19.014 wajib lapor, sebanyak 16.863 orang telah melaporkan hartanya. Untuk BUMN dan BUMD, dari total 30.373 wajib lapor baru 12.858 orang yang melaporkan LHKPN, sehingga tingkat kepatuhannya baru 42.33%.

# Membekali Puteri Indonesia Semangat Antikorupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar memberikan pembekalan mengenai nilai integritas dan sikap antikorupsi pada Selasa (3/3) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Menurutnya, para finalis Puteri Indonesia bisa melakukan peran menjadi agen perubahan.

Dalam kesempatan itu Lili mengajak para finalis Puteri Indonesia agar berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, mereka yang berasal dari seluruh Indonesia ini bisa ikut berpartisipasi dalam gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK).

"Kalau mau jadi agen perubahan, silahkan bergabung ke SPAK. Karena gerakan ini sudah berjalan di berbagai wilayah dan bisa disinergikan."

# Bersama Memerangi Kejahatan Luar Biasa

Korupsi dan penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Perlu upaya bersama, agar dua jenis kejahatan itu bisa dicegah. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan sinergi.

Kunjungan Kepala BNN Heru Winarko bersama jajarannya diterima Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (7/2). Pertemuan ini guna membahas peningkatakan kerja

sama antar kedua lembaga.

Dalam diskusi, Ketua KPK Firli Bahuri mengakui, memang belum ada 'payung' hukum antara KPK dengan BNN. Karena itu, pertemuan ini sangat penting diawali. "Untuk itu segera kita bahas materi kerja sama antar KPK dan BNN," katanya.

Firli menambahkan, kedua lembaga yakni KPK dan BNN mempunyai fungsi yang sama yaitu mencegah terjadinya kejahatan agar dampak buruk bisa diminimalisasi. "Mencegah terkait tidak melakukan korupsi dan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu kita bisa berkampanye bersama memerangi extraordinary crime untuk kemajuan Indonesia," katanya.

# **Novel Baswedan Terima Penghargaan Internasional**

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, mendapatkan penghargaan Perdana International Anti-Corruption Champion Foundation (PIACCF) pada Selasa (11/2) di Putra Jaya, Malaysia. Penghargaan diserahkan langsung Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras, keberanian, dedikasi, dan komitmen keduanya dalam memberantas korupsi. Selain Novel, PIACCF juga memberikan penghargaan kepada pegawai lembaga antikorupsi lainnya, yaitu Alm. Kevin Anthony Morais, penuntut pada Suruhanjaya Pencegahan

Rasuah Malaysia. Ia terbunuh pada tahun 2015.

Dalam kesempatan itu, Novel berterima kasih kepada Perdana International Anti-Corruption Champion Foundation (PIACF) atas penghargaan ini. Baginya, penghargaan ini adalah bentuk dukungan dan penghormatan terhadap semua pihak yang memilih jalan untuk berjuang memberantas korupsi, baik di Malaysia, Indonesia dan di seluruh dunia.

Novel juga mengapresiasi terhadap upaya Pemerintah Malaysia dalam memberikan perlindungan kepada para pegawainya dalammelaksanakan tugas untuk memberantas korupsi. Ia berharap Pemerintah Malaysia dalam hal ini Perdana Menteri, Tun DR. Mahathir bin Mohamad, untuk dapat menularkan keberhasilan dalam memberantas korupsi dan melindungi petugas pemberantas korupsi kepada negara lain, khususnya Pemerintah Indonesia.

# **KILAS**

# Dewas KPK-UNODC Bahas Penguatan Organisasi

Lima Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) meminta masukan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam penguatan organisasi antikorupsi seperti KPK. Salah satunya, perumusan kode etik organisasi yang menjadi salah satu tugas Dewas KPK.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pengawas Tumpak Hatarongan Panggabean dalam pertemuan yang digelar pada 14 Januari 2020 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta. Dalam kesempatan itu, dihadiri lima Dewas KPK, yakni yakni Tumpak Hatarongan Panggabean, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Syamsudin Haris, dan Harjono, serta Country Manager Indonesia and Liaison to ASEAN Collie F. Brown dan Programme Coordinator for Anticorruption Dwi Siska Susanti.

Brown pun berjanji bahwa pihak UNODC akan senantiasa bersedia untuk memberikan dukungan dan memberikan masukan mengenai kode etik. Selain itu pasca berlakunya Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Brown mengatakan bahwa ia telah mempelajari perubahan yang terjadi di KPK. Menurutnya, ia belum menemukan model lembaga antikorupsi di dunia seperti KPK.

"Indonesia adalah satu-satunya lembaga antirasuah yang memiliki Dewan Pengawas," ujar Brown.

# KPK dan BPKP Kuatkan Kerjasama Pencegahan Korupsi

Setelah dilantik pada 5 Februari 2020 lalu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 20 Februari 2020.

Kedatangannya disambut oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa.

Dalam pertemuan itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa fungsi pencegahan KPK dapat diperkuat jika bekerjasama dengan seluruh perwakilan BPKP yang tersebar di 34 Provinsi. Kerjasama itu tentu akan membuat pencegahan korupsi semakin efektif.

"Tugas pencegahan, kalau BPKP di daerah bisa diberdayakan dan bekerjasama dengan Korsupgah (Kordinasi dan Supervisi Pencegahan), tentu bisa efektif," uiar Firli.

Selain itu, terkait permintaan tambahan pegawai yang telah diajukan KPK, Firli berharap agar BPKP segera mengirimkan nama-nama pegawai terbaik yang bisa mengisi kekosongan posisi-posisi tertentu di KPK.

# Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik

Perlahan tapi pasti, skor Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index-CPI) Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun. Tahun ini, skor CPI Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya menjadi 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara.

Laporan itu disampaikan saat peluncuran hasil Corruption Perception Index 2019 oleh Transparency International Indonesia (TII) di Gedung Sequis Center, Jakarta

Menanggapi kenaikan CPI ini, Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsyuddin Haris mengapresiasi capaian ini. "Mudah-mudahan ke depannya skor CPI (Indonesia) bisa meningkat secara signifikan," ujarnya.

Sementara itu, Manager Riset Transparancy International Indonesia Wawan Suyatmiko mengungkapkan, kenaikan skor CPI ini menunjukan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama 2019 membuahkan hasil yang positif.

Menurutnya, ada empat sumber data yang turut menyumbang kenaikan ini, yaitu Political Risk Service, IMD World Competitiveness Yearbook, Political and Economy Risk Consultancy dan World Justice Project-Rule of Law Indeks.

# **ARVA Afghanistan Belajar Kelola LHKPN**

Komisi Pemberantasan Korupsi menerima delegasi lembaga Asset Registration and Verification Authority (ARVA) Afghanistan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta (17/2). Tujuan kedatangan delegasi ARVA untuk mempelajari pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Indonesia sebagai upaya pencegahan korupsi.

ARVA adalah lembaga pengelola laporan harta kekayaan untuk 22.000 penyelenggara negara di Afghanistan yang dibentuk pada tahun 2010. Tugas utamanya adalah pendaftaran aset, verifikasi dan validasi, pengumuman harta kekayaan serta menetapkan sanksi.

Deputy ARVA Afghanistan Azizullah Rahimi beserta rombongannya akan belajar mengenai LHKPN selama 4 hari. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan upaya meningkatkan kepatuhan LHKPN dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.

"Contohnya kepatuhan pelaporan LHKPN calon legislatif, kita bekerja sama dengan KPU selama pemilu dengan menjadikan LHKPN sebagai salah satu syarat pencalonan," kata Pahala.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Afganistan untuk Indonesia, H. E. Faizullah Zaki Ibrahim bercerita mengenai tantangan pemberantasan korupsi di Afghanistan seperti perang dan usia kemerdekaan yang masih relatif muda. "Upaya pemberantasan korupsi Afghanistan dua kali lebih sulit, karena Afghanistan masih sering terlibat perang," ujar Faizullah.

# Pancasila dan Sembilan Nilai Antikorupsi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama KPK berencana merancang kolaborasi menanamkan sembilan nilai antikorupsi, sekaligus menyebarkan informasi agar masyarakat paham mengenai nilai-nilai Pancasila.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi di Gedung Merah Putih, pada 17 Februari 2020 setelah bertemu Pimpinan KPK. Yudian menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo agar negara bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial. "Ada 127 juta lebih anak bangsa yang perlu jadi perhatian sesuai perintah Presiden Jokowi. Mereka generasi terputus yang perlu pembinaan nilai Pancasila," ujar Yudian.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyambut baik rencana ini. Menurutnya, KPK telah melakukan banyak kegiatan kampanye tentang persoalan integritas yang dikenal dengan sembilan nilai antikorupsi, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

# Setelah Afghanistan, Kini Malaysia Belajar Kelola LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan lembaga Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) dan Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) untuk belajar mengenai pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Indonesia sebagai upaya pencegahan korupsi. Sebelumnya, pada 17-20 Februari lalu, Asset Registration and Verification Authority (ARVA) Afghanistan juga belajar hal yang sama pada KPK.

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Informasi dan Data KPK Heri Muryanto mengatakan pelaporan harta secara online yang dilakukan KPK merupakan pencapaian dua unit kerja di KPK, yaitu Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dan Direktorat Pusat Informasi dan Data. Sistem ini terbangun dengan mengintegrasikan berbagai data dari berbagai pihak untuk memudahkan penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan hartanya.

Selain itu, menurut Heri, upaya ini merupakan wujud komitmen KPK yang harus menjalankan amanat United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau konvensi antikorupsi PBB yang sudah diratifikasi.

"Mari bersama-sama kita merawat kerja sama yang baik antara KPK dengan MACC dan memperluas jaringan antara KPK dengan MAMPU," ajaknya.



# KENDALA PEJABAT TIDAK LAPOR LHKPN

### **LUCAS MANALU**

via Twitter @lucasomanalu

# LOG-IN LHKPN MELALUI IPAD

AHMAD SUBAIR via Twitter
@acis70

https://elhkpn.KPK.go.id

Direktorat Pendattaran dan Pemeriksaan LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi
Gedung Merah Putih KPK - Jl. Kuningan Persada
Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950
Call Center: 198
Fax: (021) 2557 8413
Fmail: all-kno@KPK on id

Apa sih sebenarnya kesulitan dan hambatan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara? Apakah ini karena sumber harta kekayaan yang tidak benar atau karena tidak punya tanggung jawab?

Sebenarnya, jika kita lihat kembali mengenai perubahan sistem LHKPN dari sebelumnya melaporkan secara manual hingga saat ini berubah menjadi elektronik, seharusnya tidak ada lagi kesulitan atau hambatan untuk melaporkan LHKPN. Dengan sistem yang baru, penyelenggara negara tidak perlu lagi menyertakan secara detil dokumen pendukung seperti sertifikat dan juga BPKB. Hal itu cukup dengan dokumen pendukung yang berhubungan dengan perbankan dan juga surat kuasa saat pertama kali melaporkan LHKPN secara online/daring.

Untuk pertanyaan, apakah karena sumber harta kekayaan yang tidak benar atau karena tidak punya tanggung jawab, kami dapat simpulkan bahwa itu adalah masalah integritas dari penyelenggara negara tersebut, karena penerapan sanksi administratif selama ini belum berjalan secara maksimal.

Kenapa tidak bisa log-in LHKPN lewat iPad?

Alasannya karena aplikasi e-LHKPN belum kompatibel untuk digunakan di *operating system* bawaan Apple. Hal tersebut karena aplikasi Apple semua *browser* akan terhubung ke *Safari* dan e-LHKPN belum bisa digunakan pada *browser Safari*.

Kalau kepala desa mendapatkan sesuatu, apa juga termasuk gratifikasi?

Sebenarnya, jika kita lihat kembali mengenai perubahan sistem LHKPN dari sebelumnya melaporkan secara manual hingga saat ini berubah menjadi elektronik, seharusnya tidak ada lagi kesulitan atau hambatan untuk melaporkan LHKPN. Dengan sistem yang baru, penyelenggara negara tidak perlu lagi menyertakan secara detil dokumen pendukung seperti sertifikat dan juga BPKB. Hal itu cukup dengan dokumen pendukung yang berhubungan dengan perbankan dan juga surat kuasa saat pertama kali melaporkan LHKPN secara online/daring.

Untuk pertanyaan, apakah karena sumber harta kekayaan yang tidak benar atau karena tidak punya tanggung jawab, kami dapat simpulkan bahwa itu adalah masalah integritas dari penyelenggara negara tersebut, karena penerapan sanksi administratif selama ini belum berjalan secara maksimal.

Kira-kira kalau diberikan cinderamata sama negaranegara tetangga disimpan untuk koleksi sendiri atau dilaporkan ke KPK sebagai penerimaan gratifikasi ya?

Bila Bapak/Ibu menerima cinderamata misalnya berupa plakat atau kerajinan dari negara tetangga atau negara sahabat dalam kapasitas mewakili Indonesia maka penerimaan tersebut diserahkan kepada instansi untuk disimpan atau dikelola. Namun demikian yang perlu diingat adalah ada barang lain bersifat pribadi yang diterima oleh diri sendiri maka wajib dilaporkan ke KPK, misalnya seperangkat berlian dan arloji seperti yang diterima oleh Presiden Jokowi dan pejabat tinggi lainnya dari Raja Arab beberapa waktu lalu yang bernilai miliaran rupiah.

# KEPALA DESA MENERIMA HADIAH

AKWIN
via Twitter
@Akwin2989686

# CENDERA-MATA DARI LUAR NEGERI

WIKIWIK via Twitter

https://gol.KPK.go.id

Layanan Pelaporan Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Jln. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selattan 12950 Call Center 198 Email: pelaporan.gratifikasi@KPK,go.id

# CERITA PARA PEJUANG PERTAMA

uatu hari, telepon genggam Ateh berbunyi. Nama Sjahrudin Rasul tertera di layar. Lewat sambungan telepon tersebut, salah satu pimpinan jilid I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyampaikan permintaannya kepada Ateh.

"Teh, lo *bikin*in Renstra (Rencana Strategis Lembaga) nih, Renstra KPK," ucap Yusuf Ateh menirukan suara Rasul kala itu kepada Integrito.

Saat itu, Ateh masih belum bergabung dengan KPK. Namun secara langsung Rasul meminta Ateh untuk membuat rancangan renstra, struktur organisasi, hingga kode etik pegawai dan pimpinan yang akan didiskusikan oleh kelima pimpinan kala itu, Taufiequrachman Ruki, Erry R. Hardjapamekas, Tumpak H. Panggabean, Amien Sunaryadi, dan Sjahrudin Rasul.

Markas lembaga anti rasuah yang baru berdiri kala itu masih menumpang pada lembaga Sekertariat Negara di jalan Veteran, Jakarta Pusat. Gedung yang diberikan tanpa fasilitas itu membuat pimpinan hingga pegawai harus membawa peralatan bekerja sendiri, dan rela merogoh kantong sendiri karena lembaga ini belum memiliki anggaran.

"Karena kita mulai dari nol, saya bawa minuman sendiri. Beli dispenser sendiri, bawa komputer sendiri, bawa *printer* sendiri, beli makan sendiri, sendiri semua lah," ingat Ateh.

Selain harus berbekal peralatan sendiri, mereka juga rela

tidak digaji selama tiga bulan. Sampai salah satu pimpinan KPK Erry Riyana punya istilah MANTAP, yaitu Makan Tabungan. Artinya, segala kegiatan yang mereka lakukan telah menghabiskan tabungan pribadi mereka demi menjalankan lembaga KPK yang belum diberikan anggaran oleh negara.

Saat saldo tabungan semakin menipis, saat itu pula Kementerian Keuangan memberikan tunjangan sementara atau gaji sementara untuk pimpinan dan pegawai. Meski belum seberapa, hal itu cukup membantu bagi pimpinan dan pegawai sehingga mereka tidak perlu kembali menggunakan tabungan pribadinya.

Saat ditemui secara terpisah, Pimpinan KPK jilid I Erry R. Hardjapamekas juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, masa awal adalah masa yang cukup berat. Ia mengaku selama berbulan-bulan ia harus menggunakan uang pribadi demi

mensosialisasikan pencegahan korupsi ke berbagai Provinsi.

"Masa awal memang berat. Bulan-bulan pertama kita sudah mulai menyebarkan meskipun kita belum menerima 'pemasukan'," ujarnya.

Selain anggaran, tantangan kedua adalah sumber daya manusia. Awalnya, jumlah personil KPK tidak sampai 20 orang. Namun, seiring berjalannya waktu, asupan personil mulai berdatangan dari berbagai instansi.

Menurut Ateh, keterbatasan sumber daya manusia membuat pimpinan saat itu harus turun ke lapangan. Tak jarang mereka ikut ke lokasi untuk menangkap koruptor.

"Saking sedikitnya orang sampai pimpinan turun tangan juga menangkap. Terutama Pak Ruki. Berani dia," ungkap Ateh.

Meski harus bekerja dengan segala

keterbatasan, Ateh mengaku senang melakukan pekerjaan itu. Terlebih, pimpinan saat itu memiliki semangat dan jiwa kepemimpinan yang tinggi.

"Yang buat saya senang itu mereka mau ngajarin. Kayak pak Tumpak, saya belajar KUHP dari Pak Tumpak. Pak Tumpak juga selalu nungguin penyidik. Kalau penyidik belum pulang, dia *enggak* mau pulang."

Ateh mengaku meski harus menjalani pekerjaan dengan susah payah, ia tidak akan melupakan semua kenangan di KPK. Suasana kekeluargaan yang terbangun saat itu membuat dirinya bisa menjalankan tugas dengan senang bati

"Tapi happy kok, karena dekat dengan bos-bos. Tiap malam nongkrong, nonton FTV sama Pak Tumpak. Kalau Pak Rasul nontonya *infotainment*. Mereka *enggak* pernah mau nonton berita, katanya pusing," kenang Ateh.

Kepindahan pegawai KPK ke gedung C1 menjadi momen dimana Ateh harus meninggalkan KPK dan kembali mengabdi ke lembaga asalnya. Hingga akhirnya 20 Februari 2020 lalu, Ateh dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

# BICARAKAN DENGAN NADA

Hari ini mereka, pasal beralas warna Angka jadi perkara Esok siapa?

Beda yang tidak sama, beda sabda raja Timpang lantunan nada, tunggalnya mulia Hamba jaring cahaya, hamba bela gelapnya Jaga tinggi pilarnya, jaga! utipan lagu grup band Tashoora di atas bercerita tentang isu diskriminatif yang terjadi di kota asal mereka, Yogyakarta. Lagu itu menggambarkan bahwa ternyata masih ada ketimpangan antara warga non-pribumi dan warga keturunan di Yogyakarta. Disana, warga non-pribumi, dianggap tidak memiliki hak atas kepemilikan tanah.

Danang Joedodarmo, Gusti Arirang, Dita Permatas, dan Ikhwan Hastanto konsisten membawakan berbagai isu dalam setiap karyanya sejak terbentuk di tahun 2016. Seperti sembilan lagu yang terdapat dalam album Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya, yang masing-masing lagu memiliki pesan tersendiri.

"Dari sembilan lagu itu, setiap lagu merekam sebuah peristiwa," ujar vokalis dan gitaris Tashoora Danang Joedodarmo saat ditemui di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awal Desember 2019 lalu.

Sebagian besar lagu yang ditulis oleh Danang dan Gusti terinspirasi dari sebuah peristiwa atau isu yang muncul di layar televisi, koran, atau portal berita online. Sebagai anak muda, mereka merasa harus mengikuti perkembangan isu di negara ini, termasuk politik.

"Buat kita, itu sebuah keperluan di zaman sekarang untuk mengikuti perkembangan politik," ujar vokalis dan pemain bass Gusti Arirang.

"Biar enggak dibodohi negara," kata Danang menambahkan pernyataan Gusti.

Sebagai seorang musisi, Danang merasa musik bisa menjadi cara yang paling sederhana untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Saat ini, cukup sulit untuk mengajak anak muda berdiskusi mengenai isu-isu berjarak jauh dengan kehidupannya, misalnya soal pemerintah.

"Kalo misalnya lagi makan angkringan atau burjo (bubur kacang hijau), enggak bisa tuh aku ngomongin 'eh kalian tau ga sih, kalau di Yogya ada kebijakan yang masih berbasis warna, masih ngomongin SARA'. Rasanya enggak santai."

Menurutnya, pesan itu akan lebih mudah diterima jika dibicarakan melalui musik. Berawal dari mendengarkan lagunya, pendengar baru akan menerima pesannya saat menikmati musik dan memperhatikan liriknya.

"Minimal orang denger dulu. Lucunya, orang nanti nyanyi dulu, terus baru sadar kalau ternyata ceritanya tentang ini (isu diskriminasi)," kata Danang.

Dengan cara seperti itu, menurut Danang, masyarakat bisa menerima ide atau pemikiran yang ia tulis dalam lagu itu. Cara ini menurutnya akan lebih efektif dari pada berorasi atau berdakwah kepada anak muda.

"Kalau kita teriak-teriak nyuruh orang harus lakuin ini, orang malah lari."



KARYA: Tim Komik SMPN 255 Jakarta



KARYA: Tim Komik SMPN 255 Jakarta

# **KPK YANG SELALU RIUH**

Judhi Kristantini

Mantan Konsultan Daya Dimensi Indonesia Aktivis Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK)

PERIODE KE-4 KEPEMIMPINAN KPK TELAH BERAKHIR, artinya 16 tahun sudah organisasi ini berdiri menjadi bagian penting upaya Indonesia memberantas korupsi. Masih banyak yang saya ingat ketika 16 tahun lalu, atas nama Perusahaan Konsultan Daya Dimensi Indonesia terlibat dalam persiapan berdirinya organisasi ini khususnya untuk SDM dan desain operasional organisasi. Sebuah pekerjaan besar dan berat karena segunung harapan masyarakat terhadap organisasi ini.

# **Struktur Organisasi**

Dalam perjalanan sebagai konsultan SDM dan organisasi saat itu, KPK terasa sangat unik dan bikin penasaran. Bagaimana tidak, KPK adalah satu-satunya Lembaga pemerintah yang struktur organisasinya ditulis dalam UU, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, sebagai lembaga pemerintah, struktur organisasinya tergolong *flat* secara hirarki dan berbentuk matriks. Struktur organisasi matriks merupakan kombinasi struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional. Struktur ini mengakibatkan terjadinya multi-komando dimana seorang pegawai diharuskan untuk melapor kepada dua atau lebih penanggungjawab/pemimpin. Dengan hirarki yang flat, model organisasi KPK ini banyak diadopsi dengan perusahaan-perusahaan konsultan yang menekankan pada tingkat keahlian.

Struktur organisasi seperti ini tidak dimiliki oleh komisi-komisi lainnya yang cenderung mengambil bentuk struktur organisasi fungsional. KPK memiliki fungsi teknis (bidang pencegahan, penindakan, informasi dan data, pengawasan internal dan pengaduan masyarakat) dan non-teknis (sekretariat jenderal) yang masing-masing dipimpin oleh pejabat setara eselon 1. Kondisi ini sangat membantu KPK karena artinya setiap pilar divisi dipimpin oleh mereka yang memiliki keahlian. Sementara pada banyak komisi dengan struktur organisasi fungsional, eselon 1 hanya sekretaris jenderal yang memimpin sekaligus bidang teknis dan non-teknis. Kondisi pada banyak komisi lebih sulit karena seorang sekretaris jenderal harus memiliki pengetahuan dan kompetensi bidang teknis dan non-teknis. Secara teori

sesungguhnya sangat sulit mendapatkan orang dengan 2 keahlian sekaligus.

### **Sumber Daya Manusia KPK**

Dengan struktur organisasi matriks seperti ini, secara teori, KPK baru akan berhasil bila posisi-posisi kunci (setidaknya) diisi oleh SDM yang memiliki kompetensi tinggi, baik technical maupun soft competencies. Barangkali ini menjadi alasan mengapa KPK (diawalnya) dirancang untuk mendapatkan penuntut dari Kejaksaan dan penyidik dari Kepolisian. Polisi dan Jaksa adalah profesi yang dipandang memiliki kompetensi tinggi untuk kedua posisi kunci di KPK.

Selain kompetensi teknis, mereka yang bekerja di KPK haruslah orang yang tidak berorientasi kenaikan posisi sebagai karir.

Karena sesungguhnya memang tidak ada karir (hirarkhi) dalam organisasi ini, hampir semua posisi struktural diisi melalui sistem pendaftaran terbuka, dimana orang di luar KPK memiliki peluang yang sama dengan pegawai KPK untuk menduduki posisi tertentu.

KPK memerlukan orang yang berorientasi pada keahlian namun tetap rendah hati. Kualitas ini penting karena kelima mandat tugas dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menempatkan kerjasama dengan instansi lain sebagai persyaratan untuk keberhasilan kinerjanya.

Apakah ini sulit? Sangat sulit,Karena setiap orang harus memahami betul kapan harus menjadi "team player" dan kapan menjadi "team leader". Dan karena cara-cara mengelola star (orang-

orang dengan keahlian tinggi) yang jitu hampir tidak pernah ditemukan dalam text book. Hanya mereka yang memiliki kepemimpinan mumpuni yang bisa

## **Budaya Organisasi**

Ini adalah bagian tersulit. Dan terbukti hingga organisasi ini dalam hitungan enam belas tahun, budaya organisasi KPK tak pernah benar-benar solid.

Bagaimana Polisi, Jaksa, PNS dari berbagai instansi, akademisi, pegawai swasta, anggota organisasi masyarakat sipil dan masyarakat umum lainnya yang masing-masing memiliki budaya kerja bisa melebur dalam satu budaya KPK?

Upaya menyatukan dan membangun budaya KPK dipersulit lagi dengan kondisi bahwa setiap 4 tahun, Pimpinan KPK berganti. Dan setiap periode tentunya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dan tentunya memberi pengaruh budaya organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa "budaya organisasi" ini selalu bergerak/bergeser mencari kesesuaian yang dapat diterima semua pihak di dalam KPK, untuk bisa menjalankan tugas dan kewenangannya.

Kendali organisasi tidak pernah bisa sepenuhnya dipegang oleh Pimpinan yang seringkali juga tidak memiliki kepemimpinan yang mumpuni dan nyaris tidak punya kesempatan untuk benar-benar memahami kebiasaan-kebiasaan atau praktek-praktek atau model komunikasi internal organisasi yang selama ini terjadi.

Kepemimpinan yang mumpuni sangat penting karena kerja dengan tingkat stress yang begitu tinggi tetap dituntut melahirkan keputusan jitu dengan proses yang bertanggungjawab. Mereka yang masih butuh panggung, sungguh celaka untuk organisasi ini karena akan sulit memilih keputusan yang mungkin tidak popular tapi penting untuk organisasi.

Bagaimana dengan peran Deputi sebagai tingkatan tertinggi di KPK dalam pembangunan budaya? Meski tidak mudah tetapi ini adalah satu-satunya posisi yang paling mungkin menjadi pembangun dan penjaga budaya KPK.

Dengan gambaran yang sangat sedikit di atas, rasanya bisa dimengerti bila TII dalam penelitian yang berjudul Inisiatif Penguatan Lembaga Antikorupsi Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019 (ACA Assessment), menemukan fenomena bahwa:

"Terkait indikator sumber daya manusia, KPK dinilai memiliki manajemen sumber daya manusia yang belum baik—dibalik kuatnya sistem meritokrasi, pola organisasi yang modern, dan perhatian terhadap pegawai—dimana ditandai dengan tidaknya adanya cetak biru SDM, mekanisme pengangkatan pegawai internal yang sempat memicu protes karena diduga berjalan eksklusif, pengisian jabatan yang belum berjalan maksimal, minimnya perencanaan terkait keamanan pegawai, serta keahlian pegawai yang membutuhkan adaptasi baik di bidang penindakan dan pencegahan mengingat semakin luasnya dimensi kejahatan korupsi dan penggunaan Teknologi".

Sumber Daya Manusia dan Anggaran mendapatkan penilaian yang relatif terendah dibandingkan dengan bidang lainnya (Pencegahan, Pendidikan, dan Penjangkauan; Independensi dan Status, Akuntabilitas dan Integritas, Deteksi, Penyidikan, dan Penuntutan, dan Kerja Sama dan Hubungan Eksternal).

Fenomena lain yang muncul dalam dokumen tersebut adalah adanya 7 kasus pelanggaran etik yang beberapa diantaranya belum jelas penyelesaiannya. Terakhir adalah fenomena tiga Pegawai KPK menggugat pengangkatan pejabat struktural ke PTUN.

Temuan-temuan TII adalah fenomena gunung es yang diakibatkan hal-hal mendasar yang tidak pernah sepenuhnya diatasi. Bagaimana KPK dengan UU yang baru? Selamat datang Pimpinan KPK periode 5.

# Penulis:

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

Penerbit:

Prenadamedia Group

Tahun Terbit:

2018

Kolasi:

256 halaman

Bahasa:

Indonesia

# PERKEMBANGAN KEJAHATAN KORPORASI

Penetapan tersangka kepada PT Nusa Konstruksi Enjinering (PT NKE) oleh KPK merupakan perkembangan baru dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Perma Nomor 13 Tahun 2016 menjadi amunisi ampuh KPK untuk menjerat pelaku badan hukum. Atas kasus tersebut, kini PT NKE telah diputus bersalah di pengadilan.

Kejahatan korporasi telah lama menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana. Terutama dalam upaya menuntaskan pemberantasan korupsi yang tak sedikit dilakukan untuk memberikan keuntungan terhadap korporasi. Kejahatan korporasi masih menjadi hal baru di masyarakat, hal ini wajar terjadi ketika media massa lebih banyak memberitaan kejahatan berupa pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan lain yang banyak terjadi di tengah masyarakat

Ditetapkannya PT NKE dan beberapa korporasi lain sebagai tersangka menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan korporasi bukan hal yang bisa dikesampingkan kejahatan korporasi lainnya dibahas secara komprehensif melalui buku berjudul Perkembangan Kejahatan Korporasi

Buku yang ditulis oleh Arief Amrullah – Guru Besar Hukum Pidana ini merangkum berbagai peristiwa hukum di mana korporasi sebagai subjeknya. Rangkuman tersebut menggambarkan bahwa pelanggaran yang dilakukan korporasi membawa akibat buruk yang besar terhadap kemanusiaan, baik dari jumlah korban maupun dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Contohnya, banjir bandang yang melanda kawasan wisata Bukit Lawang, Sumatera Utara, di mana lebih dari 8 orang tewas dan lebih dari 80 orang hilang akibat dari *illegal logging*.

Dari berbagai fakta hukum di persidangan, penulis juga mengangkat sejumlah kejahatan korporasi di bidang keuangan yang secara signifikan telah terbukti berakibat buruk terhadap system keuangan. Contoh yang popular ialah pencalonan bupati melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan secara langsung. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki cukup dana untuk menutup seluruh kebutuhan, seperti dana kampanye, uang mahar partai, dan sebagainya.

Sebagai solusi, calon tersebut akan mencari sumber pendanaan. Seperti gayung bersambut, para pengusaha akan sangat bersukacita 'berinvestasi' melalui dana bantuan operasional kegiatan Pilkada ini. Tentu dengan berbagai kesepakatan bisnis di belakangnya, seandainya sang calon nanti terpilih.

Modus kejahatan yang dilakukan oleh korporasi pada dasarnya identik dengan bidang usaha atau bentuk aktivitasnya. Oleh karenanya, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi ini juga sangat beragam. Begitu juga bentuk atau jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, dapat berupa sanksi pokok dan/atau sanksi tambahan.

Buku ini membahas dengan runut dan membaginya dalam tiga pembabakan; Kejahatan dan perkembangannya; pertumbuhan korporasi dan perkembangan kejahatan korporasi; serta perkembangan korporasi sebagai subjek hokum pidana. Yuk, baca selengkapnya ragam kejahatan korporasi dalam buku ini yang bisa diakses di perpustakaan KPK.

# **UNBAEDAH**

Saat bulan puasa, Baedah yang terbiasa "ndobel" kembali melakukan aksinya di acara tujuh harian kematian tetangganya. Mardiyah yang tidak mendapatkan nasi berkat (sebutan untuk masakan kemasan yang didapat dari hajatan) karena keserakahan Baedah menjadi geram dan akhirnya mengajak warga untuk menakutnakuti Baedah dengan berpura-pura menjadi arwah gentayangan.

Teror arwah gentayangan pun dilakukan Mardiyah dan teman-temannya tak lama setelah Baedah tiba di rumah. Teror tesebut juga berdampak terhadap anak Baedah yang sangat ketakutan.

Dalam film pendek garapan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Padi-Padi Creative ini menampilkan Youtuber cantik asal Jawa Timur, Devina Aureel sebagai Mira.

Dari ulah iseng dan jenaka yang dilakukan Mardiyah dan teman-temannya, film ini ingin mengingatkan masyarakat untuk tidak serakah dan peduli dengan warga lain yang belum mendapatkan nasi berkat pada acara-acara hajatan di lingkungan tempat tinggal.

# Durasi:

15 menit/00:15:00

# **Aspect Ratio:**

1.85:1

# Color:

Color

# Bahasa:

Indonesian

# Format:

MP4 (Full HD)

# Rumah Produksi:

BAKARASA Film, MADEP MANTEB LAB,

PadiPadi Creative

# **Executive Produser:**

Komisi Pemberantasan Korupsi

# Produser:

Alicia Te

# Sutradara:

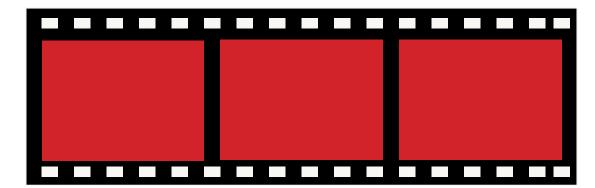
Igbal Ariefurrahman

# Penulis Naskah:

labal Ariefurrahman

# Pemain:

Siti Fauziah (Baedah), Isma Imung (Mardiyah), Devina Aureel (MIRA), Amik Angraini (Bu Darso), Ilyas Bandel (Sigit)



# TAHUKAH ANDA?

# SKOR IPAK NAIK

adan pusat statistik atau BPS mencatat indeks perilaku antikorupsi (IPAK) Indonesia sepanjang 2019 mencapai 3,7 dari skala 0 sampai 5. Nilai ini sedikit lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yakni 3,66. Deputi bidang statistik sosial BPS Margo Yuwono mengatakan survei ini dilaksanakan di 33 provinsi dengan jumlah sampel 9.952 rumah tangga. Survei IPAK hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil alias petty corruption sehingga tidak mencakup korupsi skala besar atau grand corruption. Indeks antikorupsi disusun berdasarkan dua dimensi, yakni persepsi dan pengalaman masyarakat. Dimensi persepsi dihitung berdasarkan penilaian masyarakat terhadap perilaku korup. Sedangkan dimensi pengalaman dihitung menurut pengalaman antikorupsi yang terjadi di masyarakat.

# **KUE ANTIKORUPSI**

ue ulang tahun biasanya bertemakan kartun lucu atau action figure? Tidak dengan yang satu ini. Pembuat roti di India ini punya tema yang unik. Nitin Patel membuat kue ulang tahun dengan panjang 200 meter bertemakan "antikorupsi". Kue ini dibuat untuk merayakan ulang tahun Perdana Menteri India Narendra Modi. Kue itu dibuat sebagai gambaran kalau Modi merupakan salah satu sosok antikorupsi di India. Selain bertemakan antikorupsi, kue ini juga dipotong oleh 700 orang jujur di India, berminat membuat kue antikorupsi?

# Learning Center

Corruption Eradication Commission of Indonesia



Punet Edukasi Antikorupsi (Anti-Corruption Lumming Center) Komisi Pemberantayan Korupsi

# Referensi Ilmiah Antikorupsi di Jurnal Integritas